

RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN PASURUAN**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : XVII/TAHUN 2025
TANGGAL : 31 OKTOBER 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahap kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan suatu wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan akan melibatkan serta bersentuhan langsung dengan manusia atau masyarakat. Sehingga dalam menentukan kebijakan untuk merencanakan suatu program maupun kegiatan dalam pembangunan suatu daerah perlu memperhatikan kebutuhan, aspirasi serta permasalahan yang dihadapi oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan gender. Pembangunan daerah dapat dikatakan berhasil apabila seluruh masyarakat, baik laki-laki, perempuan, kaum disabilitas, anak-anak maupun golongan lanjut usia (LANSIA) dapat menerima manfaat yang besar dari hasil pembangunan itu sendiri. Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Dinas penyelenggara pelayanan publik yang terkait dengan pelayanan masyarakat secara langsung harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik yang dihasilkan harus mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki, perempuan, kaum disabilitas, anak-anak maupun golongan lanjut usia (LANSIA).

Dengan semangat Otonomi Daerah yang berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintahan daerah melaksanakan fungsi birokrasi secara mandiri dan atas prakarsa sendiri dengan dukungan dari seluruh masyarakatnya untuk mengelola sumber daya yang ada di daerahnya, sehingga dapat tercipta keseimbangan pembangunan daerah yang berdampak positif pada pembangunan nasional yang merata dan berkesinambungan. Konsekuensinya, Pemerintah Daerah sebagai leading sector pembangunan daerah berkewajiban untuk menetapkan arah dan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan fasilitas maupun sumberdaya daerah sesuai pelimpahan kewenangan yang telah

diberikan. Disamping itu, sejalan dengan semangat reformasi, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat sangat tinggi, maka perlu adanya tata laksana pemerintahan yang baik (good governance) pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan public goods and services kepada segenap lapisan masyarakat.

Pemerintah Indonesia menyebutkan dalam Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan investasi, baik investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing) adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang selanjutnya tidak hanya akan meningkatkan

Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya perencanaan yang baik, yang merupakan bagian dari proses kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Perencanaan tersebut menentukan arah kebijakan suatu organisasi untuk tahun ke depan dan tahun-tahun berikutnya. Sebagai mana yang telah diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diwujudkan dalam perencanaan strategis. Perencanaan strategis tersebut wajib disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang hendak dilakukan. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud di atas, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra-PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029. Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan melalui Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2025-2029.

Dokumen Renstra Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan sehingga terwujud keselarasan perencanaan pembangunan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Adapun cakupan perubahan rencana strategis meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target yang ingin dicapai dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) ini juga akan dipergunakan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun memuat tentang program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, sehingga akan mempermudah setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pada kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

7. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan – Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 02 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2045;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 198 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 yaitu:

- a. Menyelaraskan arah kebijakan, tujuan, sasaran dan program daerah yang termaktub dalam RPJMD khususnya keselarasan perencanaan daerah dan perencanaan Perangkat Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Pasuruan
- b. Sebagai implementasi tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. Sebagai salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan Satu Pintu.
- d. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan kedalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029 yaitu:

- a. Membantu seluruh jajaran aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan dalam mencapai tujuan dan sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Pasuruan.
- b. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen. Sistematika Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASURUAN

- 2.1. Gambaran Pelayanan
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan
 - 2.1.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

	2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan
	2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan
	2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan
	2.2.2. Isu Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan
BAB 3	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1. Tujuan Dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan
	3.2. Strategi dan Arah Kebijakan
	3.2.1. Strategi
	3.2.2. Arah Kebijakan
BAB 4	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
	4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB 5	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

a. Tugas

Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 198 Tahun 2023 tentang perubahan peraturan bupati nomor 181 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta tugas pembantuan.

b. Fungsi

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan pengembangan potensi dan peluang di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka pelayanan perijinan dan non perijinan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Nomor 198 Tahun 2023 tentang Peraturan Bupati Nomor 181 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris dan 2 (dua) Koordinator Jabatan Fungsional. Sekretaris dibantu 1 (satu) Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

1. 1 orang Kepala Dinas
2. 1 orang Sekretaris yang membawahi Sub Bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Koordinator Jabatan Fungsional dan kelompok jabatan fungsional Penanaman Modal.
4. Koordinator Jabatan Fungsional dan kelompok jabatan fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, dan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum kepegawaian dan keuangan;
- c. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan barang milik daerah/negara;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;

- e. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan secara umum;
- g. pengelolaan administrasi dinas;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi tata laksana;
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya membawahi :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rumah tangga dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dan aset;
- e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- f. menyiapkan bahan teknis peningkatan disiplin dan sumber daya aparatur (SDA);
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) JF. Perencana (Sub koordinator Penyusunan Program dan Pelaporan) mempunyai tugas :

- a. menyusun dokumen perencanaan Dinas;
- b. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA Dinas;
- c. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA Dinas;
- d. melaksanakan koordinasi dan penyusunan DPA Dinas;
- e. melaksanakan koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA Dinas;

- f. melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
 - g. menyusun evaluasi kinerja dinas; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 3) JF Keuangan (Sub-Koordinator Keuangan) mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal mempunyai tugas:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup Daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup Daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;

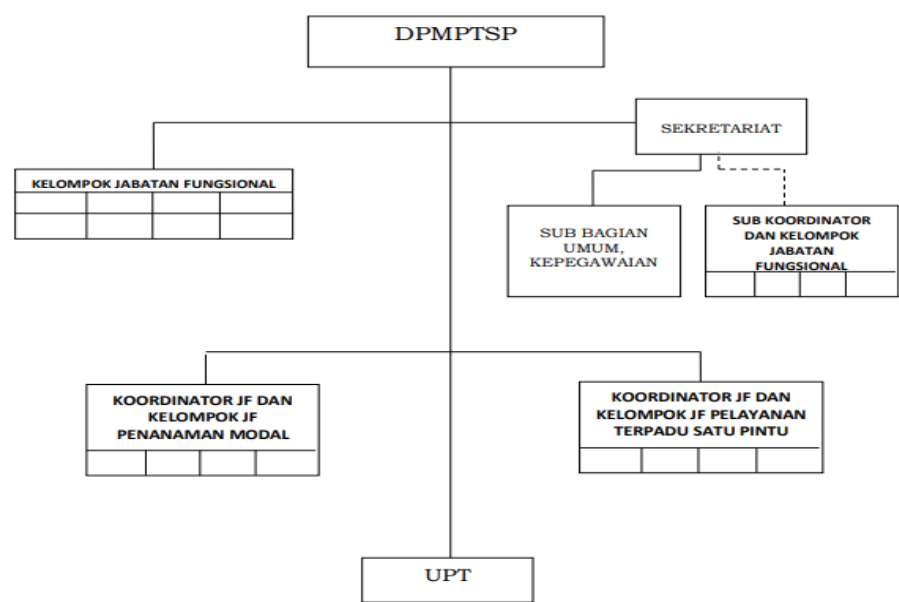
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha;
- k. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan iklim, promosi dan pengendalian penanaman modal.

c. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;

- h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Pembangunan, pengembangan serta pengelolaan system informasi perizinan berusaha dan nonperizinan;
- j. Melakukan pendampingan pelayanan sektor perizinan berusaha dan nonperizinan;
- k. Pelaksanaan pengoptimalan standart pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.



Gambar Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Pasuruan

2.1.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

a. Sumber Daya Aparatur

Dalam menyelenggarakan pelayanan penanaman modal dan perizinan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan, selain kuantitas Sumber Daya Aparatur yang harus memadai juga dibutuhkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang mencukupi diukur dari pengalaman kerja, pendidikan maupun keahliannya untuk mendukung kemampuan pelaksanaan tugas setiap aparatur Pemerintah Daerah.

Sumber Daya Aparatur adalah unsur yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Komposisi personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari : SLTP, SLTA, D3, S1 dan S2 dengan berbagai macam disiplin ilmu yaitu Administrasi, Teknik, Ekonomi, Hukum, Ilmu Sosial, Sastra Inggris, Manajemen, Administrasi Publik sedangkan berdasarkan kepangkatan mulai dari I sampai dengan IVc, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Sumber Daya Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
Sarjana (S-2)	10 orang	4	6
Sarjana (S-1)	7 orang	4	3
Diploma	0 orang	-	-
SLTA	4 orang	4	-
SLTP	1 orang	1	-
SD	0 orang	-	-

Tabel Sumber Daya Aparatur Menurut Golongan/Ruang

Golongan IV	5 orang
Golongan III	15 orang
Golongan II	2 orang
Golongan I	0 orang
Non Gol/Kontrak	5 orang

Tabel Sumber Daya Aparatur Menurut Eselon

Eselon II/b	1 orang
Eselon III/a	1 orang
Eselon III/b	0 orang
Eselon IV/a	10 orang
Non Eselon	19 orang

- Daftar Jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Laki - Laki	27
2	Perempuan	16
Jumlah		43

Tabel Data Indek Profesionalitas ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Gelar Depan	Nama Lengkap (Tanpa Gelar)	Gelar Belakang	NIP	GO L	Pangkat	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Jurusan	Nilai IP ASN
1		RIDWAN HARRIS	S.STP Msi	198208252000121002	IV/c	Pembina Utama Muda	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	S2	Magister Sains	85
2		LISTIYANI UTAMI	ST	197201171998032005	IV/a	Pembina	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	S1	Teknik Sipil	85
3		PIPING MULYO LESMONO	SE, MM	197103301992021001	IV/a	Pembina	JF Penata Kelola PM Ahli Madya	S2	Magister Manajemen	85
4		HANDOYO GESANG	ST	196607121998031009	IV/a	Pembina	JF Penata Perizinan Ahli Madya	S1	Teknik Kimia	80
5		SIWI ARI PUTRANTI	SE, MM	197403261996022002	IV/a	Pembina	JF Penata Kelola PM Ahli Muda	S2	Magister Manajemen	85
6		DALIPAH	SH	199610011989102001	III/d	Penata Tingkat I	Kasubag Umum Kepegawaian	S1	Ilmu Hukum	85
7		TIARA KHALIDA	S,Sos	198004112008012015	III/d	Penata Tingkat I	JF Penata Perizinan Ahli Muda	S1	Ilmu Sosial	85
8		RANTONY WEYARA DIENDRA SAPUTRA	SE	197901072010011007	III/d	Penata Tingkat I	JF Penata Kelola PM Ahli Muda	S1	Manajemen	80
9		SILVIA VERONIKA WIDIANA	SE, MM	198705302010012011	III/d	Penata Tingkat I	JF Penata Kelola PM Ahli Muda	S2	Magister Manajemen	85
10		ARIK SETIA ARIANTI	SH, MM	197704282007012011	III/c	Penata	JF Perencana Ahli Muda	S2	Magister Manajemen	85
11		MOHAMMAD ARIFIN	SE	198005062007011008	III/b	Penata Muda Tingkat I	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	S1	Manajemen	80
12		ROCHVIKA ARIESTA PERMATASARI	SS, MAP	198504162009022009	III/d	Penata Tingkat I	JF Penata Kelola PM Ahli Muda	S2	Magister Manajemen Administrasi Publik	85

No	Gelar Depan	Nama Lengkap (Tanpa Gelar)	Gelar Belakang	NIP	GO L	Pangkat	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Jurusan	Nilai IP ASN
13		YOVIE TRI WINDYARSO	ST, MAP	197805032010011016	III/b	Penata Muda Tingkat I	JF Penata Perizinan Ahli Muda	S2	Magister Manajemen Administrasi Publik	85
14		DIAN TRISNAWATI	SE, MAP	197801092009012002	III/b	Penata Muda Tingkat I	JF Penata Kelola PM Ahli Muda	S2	Magister Manajemen Administrasi Publik	75
15		MUHAMMAD BUSROH	SH	198208232008011005	III/b	Penata Muda Tingkat I	Bendahara	S1	Ilmu Hukum	85
16		RR. EVA WISNA AGUSTIN	MT	199008302020122010	III/b	Penata Muda Tingkat I	JF Penata Kelola PM Ahli Pertama	S2	Magister Teknik	85
17		NURLAILI	SM	198202062010012005	III/a	Penata Muda	JF Penata Perizinan Ahli Pertama	S1	Managemen	70
18		MOHAMMAD TOYIB		196903052008011018	III/a	Penata Muda	Operator Layanan Operasional	SMA		80
19		ALI IMRON		197401122007011009	III/a	Penata Muda	Pengadministrasi perkantoran	SMK	Teknik Bangunan	80
20		WILDAN BAHRUL ULUM		198202052010011010	II/d	Pengatur Tingkat I	Pengadministrasi Perizinan	SMA		80
21		SUGIANTO		196806292007011010	II/b	Pengatur Muda	Operator Layanan Operasional	SMP		70

- Daftar Jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Eselon pada Tahun 2025

No	Uraian	Laki - Laki	Perempuan
1	Eselon IIb	1	-
2	Eselon IIIa	1	-
3	Eselon IIIb	-	-
4	Eselon IVa	-	1
5	JFT	4	4
6	JFU	6	4
7	PTT	2	3
Jumlah		14	12

- Daftar Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PKKK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan pada Tahun 2025

No	Uraian	Laki - Laki	Perempuan
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	6	-
4	D3	-	1
5	S1	5	4
6	S2	-	-
7	S3	-	-
Jumlah		11	5

- Daftar Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PKKK) Paruh Waktu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan pada Tahun 2025

No	Uraian	Laki - Laki	Perempuan
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	3	-
4	D3	-	-
5	S1	-	1
6	S2	-	-
7	S3	-	-
Jumlah		3	1

➤ Daftar Jumlah Outsorcing pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan pada Tahun 2025

No	Uraian	Laki - Laki	Perempuan
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	4	1
4	D3	-	-
5	S1	-	-
6	S2	-	-
7	S3	-	-
JUMLAH		4	1

b. Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan didukung oleh:

Tabel Data Inventaris DPMPPTSP

No.	Jenis/Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meja Panjang	Lokal	1992	0	0	2	2	
2	Meja Panjang	Lokal	1992	0	0	2	2	
3	Meja Panjang	Lokal	1992	0	0	8	8	
4	Kursi Putar	ITTOKI Putar	1992	0	0	43	43	
5	Kursi Putar	ITTOKI Putar	1992	0	0	1	1	
6	A.C. Window	SANYO	2001	0	0	2	2	
7	Station Wagon	TOYOTA KIJANG KF52 STD	2002	0	0	1	1	Diusulkan Penjualan; Gudang Aset Asrama Polisi
8	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	Olivetti	2002	0	0	1	1	
9	Rak Besi	Yamanaka	2002	0	0	1	1	
10	Filing Cabinet Besi	Brother	2002	0	0	1	1	
11	Filing Cabinet Besi	OSAKA	2002	0	0	1	1	
12	Meja Rapat	Lokal	2002	0	1	0	1	
13	Meja Rapat	Lokal	2002	0	0	1	1	
14	Sketsel	Lokal	2002	0	2	0	2	
15	Kursi Rapat	Lokal	2002	0	0	7	7	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Kursi Tamu	Lokal Kursi Tunggu	2002	0	0	1	1	
17	Kursi Tamu	Lokal Kursi Tunggu	2002	0	0	2	2	
18	Meja Komputer		2002	0	0	1	1	
19	Meja Komputer		2002	0	0	4	4	
20	Meja Komputer		2002	0	0	2	2	
21	Lemari Kayu	Lokal Slorok	2002	0	0	1	1	
22	Lemari Kayu	Lokal	2002	0	0	2	2	
23	Lemari Kayu	Lokal	2002	0	0	1	1	
24	Meja Tulis	Lokal	2002	0	0	2	2	
25	Meja Tulis	Lokal	2002	0	0	1	1	
26	Meja Tulis	Lokal	2002	0	0	9	9	
27	Meja Tulis	Lokal	2002	0	0	1	1	
28	A.C. Sentral		2002	0	0	1	1	
29	A.C. Sentral		2002	0	0	3	3	
30	A.C. Window	SANYO	2002	0	0	4	4	
31	A.C. Window	SANYO	2002	0	0	3	3	
32	A.C. Split	DAICOOL	2002	0	0	1	1	
33	A.C. Split	NATIONAL	2002	0	0	1	1	
34	Kipas Angin	Maspion 17Inch	2002	0	0	1	1	
35	Exhaust Fan	NATIONAL	2002	0	0	2	2	
36	Unit Power Supply	KASUGAWA	2002	0	0	1	1	
37	Unit Power Supply		2002	0	0	1	1	
38	Meja Kerja	Lokal 1/2 Biro	2002	0	0	13	13	
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		2002	0	0	10	10	
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		2002	0	0	1	1	
41	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	Lokal Tutup Geser	2002	0	1	1	2	
42	Pesawat Telephone		2002	0	0	4	4	
43	Pesawat Telephone		2002	0	0	1	1	
44	P.C Unit		2002	0	0	2	2	
45	Sepeda Motor	HONDA LEGENDA 2	2003	1	0	0	1	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Sepeda Motor	HONDA LEGENDA 2	2003	1	0	0	1	
47	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	Brother	2003	0	0	1	1	
48	Mesin Ketik Elektronik	Brother	2003	0	0	1	1	
49	Filing Cabinet Besi	Brother	2003	0	0	2	2	
50	Filing Cabinet Besi	Royal	2003	0	0	1	1	
51	Brandkas	Ichiban	2003	1	0	0	1	
52	Meja Rapat	Lokal	2003	0	1	0	1	
53	Meja Rapat	Lokal	2003	1	0	0	1	
54	Meja Bundar		2003	0	0	2	2	
55	Kursi Tamu	ELEPHANT Frontline	2003	0	2	0	2	
56	Kursi Tamu	ELEPHANT Lipat	2003	0	3	0	3	
57	Kursi Tamu	ELEPHANT Lipat	2003	0	7	0	7	
58	Kursi Tamu	Isabel Putar	2003	0	4	0	4	
59	Kursi Putar	Isabel Putar	2003	0	2	0	2	
60	Kursi Putar	Isabel Putar	2003	0	1	0	1	
61	Meja Komputer		2003	0	0	10	10	
62	Lemari Kayu	Lokal	2003	0	0	5	5	
63	A.C. Split	MITSUBISHI	2003	0	0	1	1	
64	A.C. Split	MITSUBISHI	2003	0	0	1	1	
65	Pesawat Telephone		2003	0	0	1	1	
66	Facsimile		2003	0	0	1	1	
67	P.C Unit		2003	0	0	12	12	
68	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASERJET 1000	2003	0	0	1	1	
69	Printer (Peralatan Personal Komputer)		2003	0	1	0	1	
70	Printer (Peralatan Personal Komputer)		2003	0	0	8	8	
71	Printer (Peralatan Personal Komputer)		2003	0	0	2	2	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	HYUNDAI Trajet	2004	0	0	1	1	Diusulkan Penjualan; Gudang Aset dr. Wahidin
73	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Olivetti	2004	0	0	1	1	
74	Filing Cabinet Besi	Yamanaka	2004	0	0	1	1	
75	Filing Cabinet Besi	Olympic -	2004	0	0	1	1	
76	Filing Cabinet Besi	Brother	2004	0	0	1	1	
77	Brandkas	Yunika	2004	0	0	1	1	
78	Overhead Projector		2004	0	0	1	1	
79	Papan Pengumuman	Lokal Joglo	2004	0	0	1	1	
80	Kursi Rapat	Lokal	2004	0	1	0	1	
81	Kursi Rapat	Lokal	2004	0	4	0	4	
82	Kursi Rapat	Chitose Susun	2004	98	0	0	98	
83	Kursi Rapat	Chitose Susun	2004	1	0	0	1	
84	Kursi Rapat	Chitose Susun	2004	1	0	0	1	
85	Kursi Tamu	Lokal Kursi Tunggu	2004	0	2	0	2	
86	Kursi Tamu	Lokal Kursi Tunggu	2004	0	1	0	1	
87	Meja Komputer		2004	0	0	2	2	
88	Rak Kayu	Lokal	2004	0	1	0	1	
89	A.C. Split	TOSHIBA	2004	0	0	1	1	
90	Televisi	Polytron	2004	1	0	0	1	
91	Televisi	TOSHIBA	2004	0	0	1	1	
92	Wireless	TOA	2004	1	0	0	1	
93	Handy Cam		2004	0	0	1	1	
94	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Jagoar Direktur	2004	0	1	0	1	
95	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Jagoar Direktur	2004	0	2	0	2	
96	Photo Tustel		2004	0	0	1	1	
97	Photo Tustel		2004	0	0	1	1	
98	Photo Tustel		2004	0	0	1	1	
99	P.C Unit		2004	0	0	1	1	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	P.C Unit	HP COMPAC, EVO D 220	2004	0	0	1	1	
101	Lap Top	TOSHIBA SATELIT	2004	0	0	1	1	
102	Printer (Peralatan Personal Komputer)		2004	0	0	1	1	
103	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASERJET 1000	2004	0	0	1	1	
104	Mesin Hitung Elektronik/C alculator	NEWMARK -	2005	0	0	1	1	
105	Filing Cabinet Besi		2005	0	0	4	4	
106	Filing Cabinet Besi		2005	0	0	1	1	
107	Meja Resepsionis	Lokal	2005	1	0	0	1	
108	Sketsel		2005	0	0	1	1	
109	Kursi Tamu	Lokal Kursi Tunggu	2005	0	1	0	1	
110	Lemari Kayu	Lokal Sorok	2005	0	0	2	2	
111	MOUBILER LAINNYA	Lokal Payung	2005	1	0	0	1	
112	Exhause Fan	NATIONAL	2005	0	0	1	1	
113	Gordyin/Kray		2005	0	0	2	2	
114	P.C Unit	COMPAC DX 2000MT	2006	1	0	0	1	
115	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASER JET 1020	2006	0	0	1	1	
116	Server		2006	0	0	1	1	
117	Meja 1/2 Biro	Lokal 1/2 biro	2007	0	1	0	1	
118	Televisi	SHARP	2007	1	0	0	1	
119	DVD Player	Polytron dvd cassette	2007	0	1	0	1	
120	Alat Pemadam/Po rtable	SAKINDO	2007	1	0	0	1	
121	P.C Unit	DELL GX 520DT	2007	0	0	1	1	
122	Printer (Peralatan	EPSON LQ-2180	2007	0	0	1	1	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Personal Komputer)							
123	Printer (Peralatan Personal Komputer)		2007	0	0	1	1	
124	Printer (Peralatan Personal Komputer)		2007	0	0	1	1	
125	Scanner (Peralatan Personal Komputer)		2007	0	0	1	1	
126	Mesin Penghitung Uang	NEWMARK	2008	1	0	0	1	
127	A.C. Window		2008	0	0	1	1	
128	Unit Power Supply	PASCAL	2008	1	0	0	1	
129	Unit Power Supply	PASCAL	2008	0	1	0	1	
130	P.C Unit	DELL Optiplex 330	2008	0	0	2	2	
131	P.C Unit	DELL 14 "	2008	0	0	2	2	
132	P.C Unit	HP Pavilion G3433L	2008	0	0	1	1	
133	Lap Top	COMPAC PRESARIO C700	2008	2	0	0	2	
134	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON LQ-2180	2008	0	0	2	2	
135	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LaserJet 2015	2008	0	0	1	1	
136	Printer (Peralatan Personal Komputer)		2008	0	0	1	1	
137	Printer (Peralatan Personal Komputer)		2008	0	0	1	1	
138	Scanner (Peralatan	Microtek SCANMAKE R 3880	2008	0	1	0	1	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Personal Komputer)							
139	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	HP SCANJET, G3110	2008	0	0	1	1	
140	Digitizer (Peralatan Personal Komputer)	Viewsonic Nvision	2008	0	1	0	1	
141	Telephone (PABX)	Panasonic TES 624	2009	0	0	1	1	
142	Pesawat Telephone		2009	0	0	10	10	
143	P.C Unit	DELL inspiron . 530	2009	0	0	1	1	
144	P.C Unit	DELL Inspiron 530	2009	0	0	1	1	
145	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON LQ-2180	2009	0	0	2	2	
146	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laserjet 2015	2009	0	0	1	1	
147	Station Wagon	Suzuki APV	2010	1	0	0	1	
148	Filing Cabinet Besi	Datafile Sekat	2010	1	0	1	2	
149	Filing Cabinet Besi	Datafile Sekat	2010	2	0	0	2	
150	Meja Rapat	Lokal Lenong / Bundar	2010	2	0	0	2	
151	Meja 1/2 Biro	Lokal Ligna	2010	5	0	0	5	
152	Kursi Tamu	Lokal busa	2010	2	0	0	2	
153	Kursi Tamu	Lokal Sofa	2010	1	0	0	1	
154	Sofa	Lokal Minimalis	2010	1	0	0	1	
155	Lemari Kayu	Lokal Sorok	2010	1	0	0	1	
156	Lemari Kayu	Lokal Sorok	2010	1	0	0	1	
157	Rak Kayu	Lokal Sorok	2010	1	0	0	1	
158	Mainframe (Komputer Jaringan)	HP ML110	2010	1	0	0	1	
159	P.C Unit	Intel Core I3	2010	0	0	1	1	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	P.C Unit	Intel Core I5	2010	0	0	1	1	
161	P.C Unit	Intel Core I3	2010	0	0	2	2	
162	P.C Unit	Intel Core I3	2010	0	0	1	1	
163	Lap Top	TOSHIBA SATELITE L645	2010	1	0	0	1	
164	Monitor	LG LED 17MB15T	2010	1	0	0	1	
165	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON T20	2010	0	0	1	1	
166	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON T20E	2010	0	0	1	1	
167	Lemari Besi/Metal	Brother Sekat	2011	1	0	0	1	
168	Filing Cabinet Besi	Datafile Susun	2011	6	0	1	7	
169	Filing Cabinet Besi	2011 Susun	2011	1	0	0	1	
170	Lemari Kaca	VIP	2011	1	0	0	1	
171	Lemari Kaca	DATAFILE	2011	1	0	0	1	
172	Lemari Kaca	DATAFILE	2011	1	0	0	1	
173	Lemari Kaca	Datafile Sekat	2011	1	0	0	1	
174	Tempat sampah (keperluan Kantor)	Lokal Panjang	2011	1	0	0	1	
175	Kursi Besi/Metal	Lokal tiga seat gandeng	2011	1	0	0	1	
176	Kursi Tamu	Lokal Panjang	2011	6	0	0	6	
177	Kursi Tamu	- 2 SEAT, 1 MEJA	2011	2	0	0	2	
178	Kursi Tamu	- 2 SEAT, 1 MEJA	2011	1	0	0	1	
179	Kursi Tamu	- 3 SEAT	2011	1	0	0	1	
180	Kursi Tamu	- 3 SEAT	2011	1	0	0	1	
181	Televisi	SHARP	2011	1	0	0	1	
182	Handy Cam		2011	0	0	1	1	
183	Time Indetification Unit	Philips HOME THEATER HT5-3530	2011	1	0	0	1	
184	P.C Unit	HP PRO 2000 MT	2011	0	0	1	1	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson LQ-2180	2011	0	0	1	1	
186	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON LX-300	2011	0	0	1	1	
187	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON LX-300+II	2011	0	0	1	1	
188	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON T120	2011	0	0	1	1	
189	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON T20E	2011	1	0	1	2	
190	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON STYLUS OFICCE, T1100	2011	0	0	1	1	
191	Printer (Peralatan Personal Komputer)	FUJI XEROX, C3055DX	2011	1	0	0	1	
192	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	KIA PREGIO SE 2.7	2012	1	0	0	1	Menunggu SK Penghapus an; Telah dilelang oleh KPKNL
193	Sepeda Motor	HONDA GL15A1D M/T	2012	1	0	0	1	
194	Global Positioning System	Sony	2012	1	0	0	1	
195	Lemari Besi/Metal	VIP	2012	5	0	0	5	
196	Lemari Besi/Metal	VIP	2012	1	0	0	1	
197	Lemari Besi/Metal	VIP	2012	1	0	0	1	
198	Lemari Besi/Metal	VIP	2012	1	0	0	1	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
199	Lemari Besi/Metal	VIP Susun	2012	2	0	0	2	
200	Rak Besi	VIP	2012	10	0	0	10	
201	Rak Besi	VIP	2012	1	0	0	1	
202	Rak Besi	VIP	2012	1	0	0	1	
203	Kursi Rapat	Tiger Kursi Putar	2012	10	0	0	10	
204	A.C. Window	Panasonic	2012	1	0	0	1	
205	Unit Power Supply	ICA	2012	2	0	0	2	
206	Unit Power Supply	MATSUGAWA	2012	2	0	0	2	
207	Lensa Kamera	Canon Ixus 210	2012	1	0	0	1	
208	Telephone (PABX)	Panasonic KX-TES824ND	2012	1	0	0	1	
209	Pesawat Telephone	Panasonic KT-TS505	2012	3	0	0	3	
210	Pesawat Telephone	Panasonic KT-TG1311	2012	2	0	0	2	
211	Facsimile	Panasonic KX-MB772CX	2012	1	0	0	1	
212	Telephone (PABX)	Panasonic KX-T7730	2012	0	0	1	1	
213	P.C Unit	DELL OPTIPLEX 790	2012	1	0	2	3	
214	P.C Unit	DELL OPTIPLEX 790	2012	2	0	0	2	
215	P.C Unit	DELL OPTIPLEX 790	2012	1	0	0	1	
216	P.C Unit	DELL OPTIPLEX 790	2012	1	0	0	1	
217	P.C Unit	DELL OPTIPLEX 790	2012	1	0	0	1	
218	Lap Top	DELL INSPIRON P 20G001	2012	0	0	2	2	
219	Printer (Peralatan Personal Komputer)	BROTHER HL3070	2012	0	1	0	1	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON STYLUS, T13X	2012	0	0	1	1	
221	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON STYLUS, T13X	2012	0	0	2	2	
222	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Xerox DOCUPRINT , M205B	2012	2	0	0	2	
223	Station Wagon	TOYOTA All New Avanza Veloz 1,5 M/T	2013	1	0	0	1	
224	Sepeda Motor	HONDA VARIO, TECHNO CBS 125 PGM F1	2013	1	0	0	1	
225	Sepeda Motor	HONDA GL 15A1RR MT	2013	1	0	0	1	
226	Sepeda Motor	HONDA GL 15A1RR MT	2013	1	0	0	1	
227	Mesin Ketik Elektronik	Brother GX-820	2013	0	1	0	1	
228	Mesin Ketik Elektronik	Brother GX-8250	2013	0	1	0	1	
229	Rak Besi	Brother	2013	10	0	0	10	
230	Filing Cabinet Besi	Brother	2013	1	0	0	1	
231	Filing Cabinet Besi	Brother	2013	1	0	0	1	
232	Filing Cabinet Besi	Brother	2013	1	0	0	1	
233	Filing Cabinet Besi	Brother	2013	1	0	0	1	
234	Papan Visual/Papan Nama	INFOCUS	2013	1	0	0	1	
235	Alat Penghancur Kertas	IDEAL 2360	2013	1	0	0	1	
236	Papan Nama Instansi	Lokal Kayu	2013	0	0	1	1	
237	Meja Kerja Kayu	Lokal	2013	1	0	0	1	
238	Meja Kerja Kayu	Lokal Ligna	2013	1	0	0	1	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
239	Meja Telepon	Lokal	2013	1	0	0	1	
240	Meja Telepon	Lokal	2013	1	0	0	1	
241	Meja 1/2 Biro	Lokal Ligna	2013	3	0	0	3	
242	Meja 1/2 Biro	Lokal Ligna	2013	1	0	0	1	
243	Rak Kayu	Lokal Sorok	2013	2	0	0	2	
244	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Elektrolux	2013	1	0	0	1	
245	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Elextrolux 15 L	2013	1	0	0	1	
246	Lemari Es	Polytron	2013	1	0	0	1	
247	Exhause Fan	KDK 30RQN	2013	1	0	0	1	
248	Televisi	LG	2013	1	0	0	1	
249	Unit Power Supply	KENIKA	2013	1	0	0	1	
250	Unit Power Supply	MATSUNAG A	2013	1	0	0	1	
251	Alat Pemadam/Portable	SAKINDO 3 KG	2013	4	0	0	4	
252	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Erona Direktur	2013	7	0	0	7	
253	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Erona Direktur	2013	1	0	0	1	
254	Time Indetification Unit	PROTON	2013	1	0	0	1	
255	Lensa Kamera	Sony A35	2013	0	0	1	1	
256	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon MG3170	2013	0	0	3	3	
257	Station Wagon	TOYOTA New Avanza Veloz 1,5 A/T	2014	1	0	0	1	
258	Lap Top	Asus X452CP	2014	1	0	0	1	
259	Directional Coupler (Alat Ukur Universal)	Panasonic Pesawat Direct KX	2015	2	0	0	2	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
260	Lemari Besi/Metal	VIP 4 SUSUN	2015	1	0	0	1	
261	Rak Kayu	Lokal Credensa (500x1650x 800)	2015	1	0	0	1	
262	Rak Kayu	Lokal Credensa (450x2400x 800)	2015	4	0	0	4	
263	Rak Kayu	Lokal Credensa (450x2400x 800)	2015	1	0	0	1	
264	Rak Kayu	Lokal Credensa (550x2400x 800)	2015	1	0	0	1	
265	Rak Kayu	Lokal Credensa (400x6000x 800)	2015	1	0	0	1	
266	Overhead Projector	INFOCUS	2015	1	0	0	1	
267	Papan Pengumuman	Lokasl Papan Layanan Informasi	2015	1	0	0	1	
268	Papan Pengumuman	Lokal Papan Layanan Informasi	2015	1	0	0	1	
269	Tempat sampah (keperluan Kantor)	Lokal IT Interactive Corner	2015	1	0	0	1	
270	Meja Rapat	Lokal	2015	1	0	0	1	
271	Meja Rapat	Lokal Persegi	2015	1	0	0	1	
272	Meja Rapat	Lokal Persegi	2015	1	0	0	1	
273	Meja Rapat	Lokal Persegi	2015	2	0	0	2	
274	Meja Rapat	Lokal Persegi	2015	1	0	0	1	
275	Meja Resepsionis	Lokal Counter Receptionist	2015	1	0	0	1	
276	Kursi Rapat	Veroty Putar/Bersa ndar	2015	24	0	0	24	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
277	Kursi Tamu	Lokal Garuda	2015	1	0	0	1	
278	Kursi Biasa	Veroty Putar/Bersa ndar	2015	2	0	0	2	
279	Bangku Tunggu	Lokal 4 Seater	2015	6	0	0	6	
280	Sofa	Lokal Sofa L - 7 Seater	2015	1	0	0	1	
281	Sofa	Lokal Sofa L - 6 Seater	2015	1	0	0	1	
282	Meja Makan	Lokal Besar	2015	1	0	0	1	
283	Meja Tanbahan	Lokal Side Desk	2015	8	0	0	8	
284	Meja Tanbahan	Lokal Side Desk	2015	8	0	0	8	
285	MOUBILER LAINNYA	Lokal Pelengkap	2015	1	0	0	1	
286	Kursi Kerja	Veroty Putar/Bersa ndar	2015	18	0	0	18	
287	Kursi Kerja	Veroty Putar/Bersa ndar	2015	2	0	0	2	
288	Kursi Kerja	Veroty Putar/Bersa ndar	2015	15	0	0	15	
289	Kursi Kerja	Veroty Putar/Bersa ndar	2015	15	0	0	15	
290	Kursi Kerja	Veroty Putar/Bersa ndar	2015	1	0	0	1	
291	Kursi Kerja	Veroty Putar/Bersa ndar	2015	1	0	0	1	
292	A.C. Split	Panasonic 1 PK	2015	6	0	0	6	
293	A.C. Split	Panasonic 1/2 PK	2015	6	0	0	6	
294	A.C. Split	Panasonic 1 PK	2015	4	0	0	4	
295	A.C. Split	Panasonic 1/2 PK	2015	5	0	0	5	
296	A.C. Split	Panasonic air cutain	2015	1	0	0	1	
297	Kitchen Set	Lokal Kitchen Set Bawah	2015	1	0	0	1	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
298	Kitchen Set	Lokal Kitchen Set Atas	2015	1	0	0	1	
299	Televisi	TOSHIBA LED TV	2015	1	0	0	1	
300	Alat Hiasan	Lokal Display Piala	2015	1	0	0	1	
301	Handy Cam	Panasonic HC-V270	2015	0	0	1	1	
302	Gordyin/Kray	Shin - Ichi Vertikal	2015	1	0	0	1	
303	Gordyin/Kray	Shin - Ichi	2015	50	0	0	50	
304	Gordyin/Kray	Shin - Ichi	2015	1	0	0	1	
305	Meja Kerja	Lokal Persegi	2015	1	0	0	1	
306	Meja Kerja	Lokal Persegi	2015	47	0	0	47	
307	Meja Kerja	Lokal Per	2015	1	0	0	1	
308	Meja Kerja	Lokal Persegi	2015	1	0	0	1	
309	Meja Tamu Biasa	Lokal Meja Sofa	2015	2	0	0	2	
310	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	Veroty Bersandar	2015	1	0	0	1	
311	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	Veroty Bersandar	2015	2	0	0	2	
312	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	Veroty Bersandar	2015	19	0	0	19	
313	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	Veroty Bersandar	2015	1	0	0	1	
314	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	Veroty Bersandar	2015	1	0	0	1	
315	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	Veroty Bersandar	2015	1	0	0	1	
316	Kursi Hadap Depan Meja	Veroty Bersandar	2015	1	0	0	1	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kerja Pejabat Eselon III							
317	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Veroty Bersandar	2015	5	0	0	5	
318	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Lokal -	2015	1	0	0	1	
319	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Lokal 2 Susun	2015	1	0	0	1	
320	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Lokal 2 Susun	2015	1	0	0	1	
321	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Lokal 2 susun	2015	1	0	0	1	
322	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Lokal 2 Susun	2015	6	0	0	6	
323	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Lokal 2 Susun	2015	1	0	0	1	
324	Telephone (PABX)	Panasonic PABX 4 PTT. ,50 Ext.	2015	1	0	0	1	
325	Pesawat Telephone	Panasonic KX-TS505MXW	2015	2	0	0	2	
326	Pesawat Telephone	Panasonic KX-TS505MXW	2015	11	0	0	11	
327	Facsimile	Panasonic KX-FP206	2015	1	0	0	1	
328	Bed Side Cabinet	Lokal Side Desk	2015	1	0	0	1	
329	P.C Unit	HP Pavilion AiO 20-2212D	2015	1	0	0	1	
330	P.C Unit	HP Pavilion 23-Q123D	2015	1	0	0	1	
331	P.C Unit	HP Pavilion 23-Q123D	2015	1	0	0	1	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
332	P.C Unit	HP Pavilion 23-Q123D	2015	5	0	0	5	
333	P.C Unit	NULL Intel® Core™ i3-5150	2015	1	0	0	1	
334	Lap Top	HP ENVY 14-U211TX	2015	1	0	0	1	
335	UPS	APC BX1100CL-MS	2015	1	0	0	1	
336	Monitor	SAMSUNG LED LED (S19D300HY)	2015	1	0	0	1	
337	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser Jet PRO 400 M401d	2015	0	0	1	1	
338	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser Jet PRO 400 M401d	2015	1	0	0	1	
339	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser Jet PRO 400 M401d	2015	1	0	0	1	
340	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser Jet PRO 400 M401d	2015	1	0	0	1	
341	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser Jet PRO 400 M401d	2015	1	0	0	1	
342	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON LX-310	2015	1	0	0	1	
343	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON LQ 2190	2015	1	0	0	1	
344	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L-360	2015	5	0	2	7	
345	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L360	2015	0	0	1	1	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
346	Global Positioning System	Sony	2016	1	0	0	1	
347	Lemari Penyimpan	Brother MFB-6S	2016	2	0	0	2	
348	Mesin Pompa Air	SHIMITZU PC.260 BIT	2016	1	0	0	1	
349	Exhaust Fan	KDK 30QRNS	2016	1	0	0	1	
350	Exhaust Fan	KDK KDK 30RQN5	2016	5	0	0	5	
351	Exhaust Fan	KDK KDK 30RQN5	2016	2	0	0	2	
352	Exhaust Fan	KDK 30RQN5	2016	1	0	0	1	
353	Exhaust Fan	KDK KDK 30RQN5	2016	1	0	0	1	
354	Camera Video	Panasonic CV-CPW103L	2016	5	0	1	6	
355	Camera Video	Panasonic CV-CPW103L	2016	1	0	0	1	
356	Camera Video	Panasonic CV-CPW103L	2016	2	0	1	3	
357	Dispenser	SHARP SWD-75EHL-SL	2016	2	0	0	2	
358	Dispenser	SHARP SWD-75EHL-SL	2016	1	0	0	1	
359	Dispenser	SHARP SWD-75EHL-SL	2016	2	0	0	2	
360	Telephone (PABX)	Panasonic KX-FP701	2016	1	0	0	1	
361	Wheel Chair	SELLA KEMENKES RI AKL 11402702454	2016	1	0	0	1	
362	P.C Unit	HP 510-p049d	2016	1	0	0	1	
363	P.C Unit	HP 510-p049d	2016	1	0	0	1	
364	P.C Unit	HP 510-p049d	2016	1	0	0	1	
365	P.C Unit	HP 510-p049d	2016	1	0	0	1	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
366	P.C Unit	HP 510-p049d	2016	1	0	0	1	
367	P.C Unit	HP 510-p049d	2016	1	0	0	1	
368	Lap Top	N/A INTEL CORE i5	2016	1	0	0	1	
369	Lap Top	HP INTEL CORE i7-6500U	2016	1	0	0	1	
370	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP ALL IN ONE Deskjet GT 5820	2016	0	0	1	1	
371	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP ALL IN ONE Deskjet GT 5820	2016	1	0	1	2	
372	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP ALL IN ONE Deskjet GT 5820	2016	0	0	1	1	
373	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP ALL IN ONE Deskjet GT 5820	2016	0	0	1	1	
374	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Deskjet GT 5820	2016	1	0	0	1	
375	Router	Mikrotik RB 750	2016	1	0	0	1	
376	Router	Mikrotik RG 410 B	2016	1	0	0	1	
377	Kabel UTP	AMP Netconnect Cat 5	2016	1	0	0	1	
378	Kabel UTP	AMP Netconnect Cat 5	2016	1	0	0	1	
379	Mesin Absensi	FingerSpot	2017	1	0	0	1	
380	Mesin Pemotong Rumput	Briggs & station BP43-W	2017	1	0	0	1	
381	A.C. Split	Panasonic	2017	3	0	0	3	
382	A.C. Split	Panasonic CS-XN7SKJ	2017	1	0	0	1	
383	Televisi	LG	2017	2	0	0	2	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
384	P.C Unit	Lenovo Corei5-75000	2017	2	0	0	2	
385	Note Book	Lenovo Yoga 520-14IKB	2017	2	0	0	2	
386	Note Book	Lenovo Yoga 520-14IKB	2017	1	0	0	1	
387	Hard Copy Console	Canon Pixma G3000	2017	1	1	0	2	
388	Server	Lenovo Xeon 18c E5-2697v4	2017	1	0	0	1	
389	P.C Unit	HP Pavilion 24-R011D AIO	2018	1	0	0	1	
390	P.C Unit	HP Pavilion 24-R011D AIO	2018	1	0	0	1	
391	P.C Unit	HP Pavilion 24-R011D AIO	2018	3	0	0	3	
392	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON LQ 590 DOT METRIK	2018	1	0	0	1	
393	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	FUJITSU Imaje Scanner Fi 7460	2018	1	0	0	1	
394	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	BROTHER SCANNER ADS 2100 E	2018	1	0	0	1	
395	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	BROTHER SCANNER ADS 2100 E	2018	1	0	0	1	
396	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	BROTHER SCANNER ADS 2100 E	2018	1	0	0	1	
397	Mesin Absensi	Fingerspot Revo FF 153 BNC Pro	2019	1	0	0	1	
398	Mesin Absensi	Fingerspot Neo A-152NC	2019	2	0	0	2	
399	Meja Komputer	INFORMA	2019	3	0	0	3	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	Meja Kerja	sieben	2019	2	1	0	3	
401	Microphone Connector Box	ANYSONG PMM 1008	2019	1	0	0	1	
402	P.C Unit	ASUS VIVO AiO V241IC	2019	1	0	0	1	
403	P.C Unit	ASUS VIVO AiO V241IC	2019	1	0	0	1	
404	P.C Unit	ASUS VIVO AiO V241IC	2019	2	0	0	2	
405	Note Book	HP 14s-cf0065TX	2019	1	0	0	1	
406	Note Book	HP 14s-cf0065TX	2019	1	0	0	1	
407	Note Book	HP 14S-CF0065TX	2019	1	0	0	1	
408	UPS	PROLINK Pro2000-SFC	2019	1	0	0	1	
409	Hard Copy Console	EPSON L3150	2019	1	0	0	1	
410	Hard Copy Console	EPSON L3150	2019	1	0	0	1	
411	Hard Copy Console	EPSON L3150	2019	1	0	0	1	
412	Hard Copy Console	EPSON L 6170	2019	1	0	0	1	
413	External/ Portable Hardisk	Western Digital Eksternal	2019	4	0	0	4	
414	Wireless Access Point	TP - LINK	2019	2	0	0	2	
415	Wireless Access Point	TP - LINK	2019	1	0	0	1	
416	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	knapshak 10216254	2020	1	0	0	1	
417	Meja Rapat	PT Datascrip Meja Rapat 240x100 cm Mezzo Series	2020	1	0	0	1	
418	Meja Resepsionis	Stramm MCT 02-H	2020	1	0	0	1	
419	Kursi Putar	Stramm II GAR Synch Tx2 SCB	2020	65	0	0	65	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
420	Kursi Biasa	Stramm Senator III CA Chr	2020	76	0	0	76	
421	Bangku Tunggu	Vinoti Sofa Puff 1S	2020	12	0	0	12	
422	Bangku Tunggu	Vinoti Sofa Puff 3S	2020	30	0	0	30	
423	Sofa	Stramm WL 3 Seater	2020	2	0	0	2	
424	Sofa	Stramm Kursal 1 seater	2020	2	0	0	2	
425	Meja Kerja	PT Datascrip Meja kerja set dengan meja samping plus mobile drawer - Arjuna	2020	19	0	0	19	
426	Meja Kerja	PT Datascrip Meja Kerja dengan Mobile Drawer - Arjuna Series	2020	43	0	0	43	
427	Meja Tamu Biasa	Stramm Meja CT WL Mahoni	2020	2	0	0	2	
428	Head Compensator	PROLINK PRO906-WS	2020	2	0	0	2	
429	Camera Electronic	CANON PS-G7XMARK II	2020	1	0	0	1	
430	Video Monitor	PHILIPH 55BDL	2020	1	0	0	1	
431	Wash Bak	LOKAL batu alam	2020	1	0	0	1	
432	ELECTRIC GENERATING SET LAINNYA	PERKINS 1103A-33TG2 Silent (60 kVA)	2021	1	0	0	1	
433	Gerobak Dorong	Krisbow -	2021	1	0	0	1	
434	Mesin Fotocopy Lainnya	Sharp AR-6020V	2021	1	0	0	1	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
435	Rak Kayu	LOKAL Kotak	2021	1	0	0	1	
436	Filing Cabinet Besi	VIP V-302	2021	19	0	0	19	
437	CCTV - Camera Control Television System	Hikvision 16ch	2021	1	0	0	1	
438	Alat Penghancur Kertas	ZSA Auto 75	2021	2	0	0	2	
439	Hand Metal Detector	Garret 1165190	2021	1	0	0	1	
440	Display	Viewsonic Tochsreen floorstand	2021	1	0	0	1	
441	Display	IKM Screen	2021	1	0	0	1	
442	Display	Tricolor pontus-1.5u (8i8o)	2021	1	0	0	1	
443	Mesin Laminating	TLC 6061 P	2021	1	0	0	1	
444	LCD Projector/Info cus	Panasonic PT-LB-306XGA	2021	1	0	0	1	
445	Meja Resepsionis	LOKAL Panjang	2021	1	0	0	1	
446	Meja Tambahan	LOKAL Panjang	2021	1	0	0	1	
447	Meja Panjang	LOKAL Panjang	2021	1	0	0	1	
448	Meja 1/2 Biro	Lokal -	2021	3	0	0	3	
449	Sofa	Lokal -	2021	15	0	0	15	
450	Sofa	Lokal -	2021	8	0	0	8	
451	Sofa	Lokal -	2021	2	0	0	2	
452	Meja Tanbahan	LOKAL -	2021	1	0	0	1	
453	Rak Kayu	LOKAL -	2021	1	0	0	1	
454	Rak Kayu	Lokal -	2021	2	0	0	2	
455	Control Clock	Mirado MQ8877	2021	4	0	0	4	
456	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Karcher NT 38/1 Me	2021	1	0	0	1	
457	Mesin Penghisap	Karcher NT 38/1 Me	2021	1	0	0	1	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Debu/Vacuum Cleaner							
458	Lemari Es	Sharp SJN182	2021	1	0	0	1	
459	A.C. Split	PANASONIC SPLIT	2021	3	0	0	3	
460	A.C. Split	PANASONIC SPLIT	2021	17	0	0	17	
461	A.C. Split	Daikin RC15NV14	2021	4	0	0	4	
462	A.C. Split	Daikin RC25NV14	2021	2	0	0	2	
463	Kipas Angin	Maspion PW5071	2021	1	0	0	1	
464	Kompore Listrik (Alat Dapur)	Kirin KIC 1000	2021	2	0	0	2	
465	Teko Listrik	Sharp EKJ-156-BK	2021	1	0	0	1	
466	Teko Listrik	Sharp EKJ-156_BK	2021	1	0	0	1	
467	Televisi	Polytron LED	2021	16	0	0	16	
468	Televisi	Panasonic LED	2021	4	0	0	4	
469	Tangga Aluminium	Lokal Lipat	2021	1	0	0	1	
470	Dispenser	Sanken HWD Z88	2021	1	0	0	1	
471	Dispenser Water (Hot, Cold, Warm)	SANKEN HWD-Z96	2021	3	0	0	3	
472	Alat Pemadam/Portable	Indoka -	2021	12	0	0	12	
473	Alat Pemadam/Portable	Indoka -	2021	1	0	0	1	
474	Professional Sound System	TOA ZA 230 W	2021	10	0	0	10	
475	Layar Proyektor	Inforce 70"	2021	1	0	0	1	
476	Camera Electronic	Canon EOS 1500D	2021	1	0	0	1	
477	Tripod Camera	Takara B18	2021	1	0	0	1	
478	Printer	Brother Inkjet	2021	11	0	0	11	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		A3HL-T4000DW						
479	Printer	HP laser 107a	2021	1	0	0	1	
480	Printer	HP laser 107a	2021	10	0	0	10	
481	Printer	HP laser 107a	2021	1	0	0	1	
482	Printer	Brother Inkjet A3HL-T4000DW	2021	1	0	0	1	
483	Printer	LQ- 310 dot matrix	2021	3	0	0	3	
484	Pesawat Telephone	Panasonic KX-TS505	2021	22	0	0	22	
485	Handy Talky (HT)	Wln KD-C1	2021	5	0	0	5	
486	Ambubag	MRM -	2021	1	0	0	1	
487	Tabung Oksigen	Lokal -	2021	1	0	0	1	
488	Tiang Infus	Lokal -	2021	1	0	0	1	
489	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	Bistos BT-200L	2021	1	0	0	1	
490	Whell Chair	Husada 875	2021	1	0	0	1	
491	Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain)	GEA ZT 120	2021	1	0	0	1	
492	Air Purlier	Astron AF-110VT	2021	4	0	0	4	
493	Mini Komputer	MSL Modern AM241 11M	2021	4	0	0	4	
494	Mini Komputer	Asus P11c-X series	2021	1	0	0	1	
495	P.C Unit	HP TPC F 123	2021	1	0	0	1	
496	P.C Unit	HP TPC F 123	2021	1	0	0	1	
497	Lap Top	HP pavillion gaming 14-ec1076AX	2021	1	0	0	1	
498	Lap Top	HP pavillion gaming 15-ec1076AX	2021	2	0	0	2	
499	Tablet PC	Samsung Galaxi S6 lite 128GB-SM-	2021	4	0	0	4	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		P615NZAEX ID						
500	Tablet PC	Samsung S7	2021	1	0	0	1	
501	Webcam	Camtech 1080p	2021	1	0	0	1	
502	CPU (Peralatan Mini Komputer)	Asus Vivomini vm 65	2021	40	0	0	40	
503	CPU (Peralatan Personal Komputer)	ACER C22-1650 DQBG6SN.003	2021	1	0	0	1	
504	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L 1300 - A3	2021	1	0	0	1	
505	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Pixma G3010	2021	1	0	0	1	
506	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	FUJITSU f1-7030	2021	9	0	0	9	
507	External/ Portable Hardisk	Seagate Expansion	2021	1	0	0	1	
508	Router	Mikrotik Cisco CCR1016-125-15	2021	1	0	0	1	
509	Sound System	HUPER JL-12	2022	1	0	0	1	
510	Vertikal Blind	SHARP POINT -	2022	1	0	0	1	
511	Gordyin/Kray	Lokal Wiru - Wiru	2022	1	0	0	1	
512	Camera Digital	Custom kAMERA SKCK	2022	1	0	0	1	
513	Finger Print Camera	KOJAK INTEGRATED BIOMETRIC S TEN - PRINT ROLL SCANNER	2022	1	0	0	1	
514	Note Book	ASUS P1412CEA	2022	1	0	0	1	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
515	Note Book	DELL LATITUDE 3410	2022	1	0	0	1	
516	Tablet PC	Samsung Galaxy Tab S7 FE	2022	1	0	0	1	
517	Tablet PC	Samsung Galaxy Tab S7 FE	2022	1	0	0	1	
518	Tablet PC	Samsung Galaxy Tab S7 FE	2022	1	0	0	1	
519	Card Reader (Peralatan Mainframe)	ABAKA SMART CARD READER D SERIES	2022	1	0	0	1	
520	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L3210	2022	1	0	0	1	
521	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON PIXMA TR150	2022	1	0	0	1	
522	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Custom SKCK	2022	1	0	0	1	
523	External/ Portable Hardisk	SEAGATE ONETOUCH	2022	1	0	0	1	
524	External/ Portable Hardisk	TOSHIBA CANVIO BASIC	2022	1	0	0	1	
525	Vertikal Blind	SHARPPOIN T 6045-3 GREY	2023	1	0	0	1	
526	Vertikal Blind	SAKURA ROLLER BLINDS 7902	2023	1	0	0	1	
527	Lift	SENSOR LIFT -	2023	1	0	0	1	
528	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	PANASONIC BQ-CC55E	2023	1	0	0	1	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
529	Note Book	ACER TRAVELMA TE P214	2023	1	0	0	1	
530	CPU (Peralatan Personal Komputer)	GEAR GS- I710416H2S 56W10P	2023	1	0	0	1	
531	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON ECOTANK L3210	2023	1	0	0	1	
532	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON ECOTANK L3210	2023	1	0	0	1	
533	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON ECOTANK L3210	2023	1	0	0	1	
534	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON LQ - 2190	2023	1	0	0	1	
535	Station Wagon	TOYOTA Innova Zenix 2.0 V CVT / MAGA10R - BRXMBD	2024	1	0	0	1	
536	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGA N LAINNYA	TOYOTA RUSH 1.5 M/T GR Sport	2024	1	0	0	1	
537	CCTV - Camera Control Television System	HIKVIDION HIKVISION	2024	1	0	0	1	
538	Alat Pencetak Label	ZEBRA ZD421t	2024	1	0	0	1	
539	Alat Sidik Jari	MAJORE FB5300	2024	1	0	0	1	
540	Alat Sidik Jari	MAJORE FB5300	2024	1	0	0	1	
541	Alat Sidik Jari	MAJORE FB5300	2024	1	0	0	1	
542	Kursi Besi/Metal	IMPACT D- 455 / 3 Seater	2024	2	0	0	2	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
543	Kursi Kerja	TIGER DR-24LK	2024	7	0	0	7	
544	Kursi Kerja	TIGER WS-996	2024	2	0	0	2	
545	A.C. Split	POLYTRON NEUVA PRO PAC 18VZ	2024	8	0	0	8	
546	A.C. Split	POLYTRON PSF3032	2024	1	0	0	1	
547	Loudspeaker	TOA ZH-5050M-AS	2024	1	0	0	1	
548	Loudspeaker	TOA ZS-1030 B	2024	1	0	0	1	
549	Meja Kerja	TIGER OD-04	2024	7	0	0	7	
550	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	Panasonic Eneloop Basic 4	2024	1	0	0	1	
551	Camera Digital	CANON EOS 1500D	2024	1	0	0	1	
552	Camera Digital	CANON EOS 1500D	2024	1	0	0	1	
553	Camera Digital	CANON EOS 1500D	2024	1	0	0	1	
554	Mesin Pembuat ID Card	ENTRUST EM2S	2024	1	0	0	1	
555	Note Book	APC ThinkPad X13 Gen 4	2024	1	0	0	1	
556	Note Book	ASUS EXPERTBOOK BG1408CVA	2024	1	0	0	1	
557	UPS	APC SUA5000R MI5U	2024	1	0	0	1	
558	UPS	APC BVX1200LI-MS	2024	1	0	0	1	
559	UPS	APC BVX1200LI-MS	2024	1	0	0	1	
560	UPS	APC BVX1200LI-MS	2024	1	0	0	1	
561	UPS	APC BVX1200LI-MS	2024	1	0	0	1	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
562	UPS	APC BVX1200LI- MS	2024	1	0	0	1	
563	UPS	APC BVX1200LI- MS	2024	1	0	0	1	
564	UPS	APC BVX1200LI- MS	2024	1	0	0	1	
565	CPU (Peralatan Personal Komputer)	AXIOO Mypc Pro L5M 16N9- 24	2024	10	0	0	10	
566	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON TM- T82X	2024	1	0	0	1	
567	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON WORKFORC E WF-100	2024	1	0	0	1	
568	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw	2024	1	0	0	1	
569	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser 107w Printer (4ZB7BA)	2024	1	0	0	1	
570	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser 107w Printer (4ZB7BA)	2024	1	0	0	1	
571	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser 107w Printer (4ZB7BA)	2024	1	0	0	1	
572	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3210	2024	1	0	0	1	
573	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3210	2024	1	0	0	1	
574	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3210	2024	1	0	0	1	
575	Printer (Peralatan	Epson L3210	2024	1	0	0	1	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Personal Komputer)							
576	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3210	2024	1	0	0	1	
577	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3210	2024	1	0	0	1	
578	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3210	2024	1	0	0	1	
579	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Work Force DS-530IIA4	2024	1	0	0	1	
580	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Work Force DS-530IIA4	2024	1	0	0	1	
581	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Work Force DS-530IIA4	2024	1	0	0	1	
582	Printer (Peralatan Personal Komputer)	MATICA P-402i	2024	1	0	0	1	
583	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	THALES AT9000 MK2	2024	1	0	0	1	
584	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	RICOH Fi-8170	2024	1	0	0	1	
585	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	RICOH Fi-8170	2024	1	0	0	1	
586	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	RICOH Fi-8170	2024	1	0	0	1	
587	Digitizer (Peralatan Personal Komputer)	INTUOS CTL-6100WL	2024	1	0	0	1	

No.	Jenis>Nama	Merk/Tipe	Tahun Pengada an	Kondisi			Juml ah	Keterangan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
588	Server	DELL POWEREDGE R760	2024	1	0	0	1	
589	Rak Server	FORTUNA RACK FRSC42UD1 100W600	2024	1	0	0	1	
590	Switch	APC AP5816	2024	1	0	0	1	
591	Switch	RUCKUS ICX 7150-24P-4X1G	2024	1	0	0	1	

- Sarana Pendukung Administrasi berupa :
 - 1. Komputer : 75 buah
 - 2. Laptop : 17 buah
 - 3. Mesin Ketik Elektrik : 1 buah
 - 4. Mesin Hitung Uang : 0 buah
 - 5. Kamera digital : 5 buah
 - 6. Mesin penghancur kertas : 3 buah
 - 7. Printer : 62 buah
- Sarana Mobilitas didukung dengan :
 - 1. Kendaraan roda empat : 5 Unit
 - 2. Kendaraan roda dua : 6 Unit

Dalam hal menunjang sarana mobilitas operasionalnya pelayanan perizinan membutuhkan dukungan 1 unit Mobil Keliling (OB-Van) ke desa-desa dan kecamatan. Sehingga DPMPTSP bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Adapun inovasi yang sudah kami lakukan yaitu layanan kepada pelaku usaha difabilitas yang mempunyai usaha. Kami memberikan layanan pendampingan sampai bisa diterbitkan perizinannya.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan adalah Meningkatkan Nilai Investasi Daerah.

Selama periode tahun 2020 s/d 2024 Realisasi Investasi di Kabupaten Pasuruan menunjukkan peningkatan yang cukup impresif dimana pada Tahun 2020 realisasi investasi tercatat Rp.10.012.281.721.669,00 menurun menjadi Rp.8.366.891.562.869,00 di Tahun 2021 serta terus meningkat di tahun-tahun berikutnya berturut turut tercatat Rp.12.601.392.012.349,00 di Tahun 2022, Rp.12.247.178.649.713,00 di Tahun 2023 dan Rp.12.895.939.500.000,00 di Tahun 2024. Masing – masing capaian di tiap tahun tersebut mampu mengungguli target realisasi, meski pada tahun kedua yakni di Tahun 2021, dimana realisasi investasi tidak tercapai. Capaian atas target Tahun 2020 s/d 2024 mencapai 104,29%, 83,66 %, 122,94 %, 116,44 % dan 138,71 %.



Diagram Target dan Realisasi Investasi Kabupaten pasuruan Tahun 2020 – 2024

Pencatatan Realisasi Investasi terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berasal dari hasil pelaporan pelaku usaha dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang sesuai amanat Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 setiap triwulan bagi Pelaku Usaha Menengah Besar serta tiap semester bagi Usaha Kecil. Pelaporan yang selanjutnya dicatat sebagai realisasi adalah atas modal tetap di tiap periode yang terbagi atas tahap konstruksi dan produksi. Oleh karenanya, realisasi ini cenderung fluktuatif dan bergantung pada kepatuhan pelaporan oleh pelaku usaha. Selama 3 tahun terakhir, kontribusi PMDN masih mendominasi realisasi investasi dengan rata-rata 53% sedangkan PMA 47%. Hal ini disebabkan wilayah di Kabupaten Pasuruan memiliki proyek investasi PMA dan PMDN yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan, baik skala kecil, menengah maupun besar.

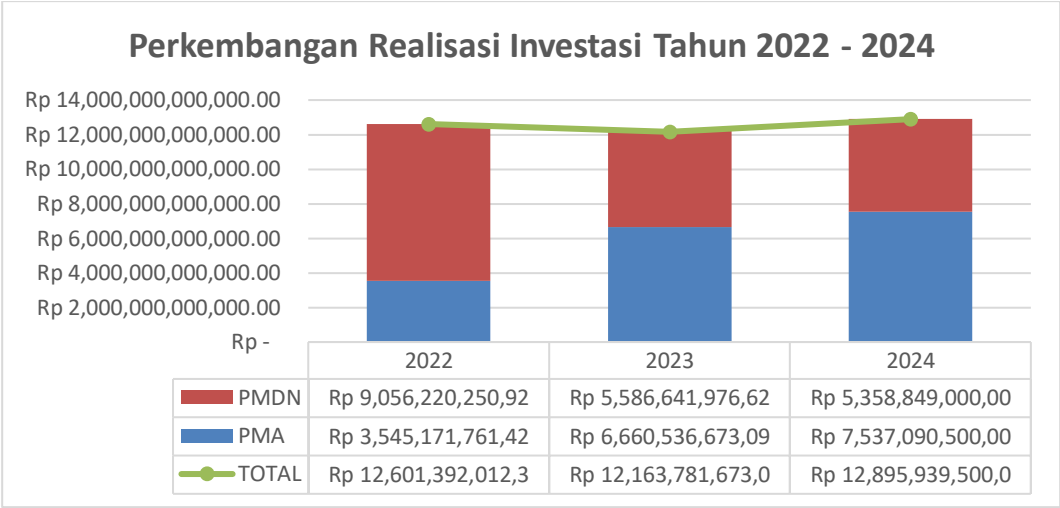


Diagram Perkembangan Reailisasi Investasi Kabupaten Pasuruan
Tahun 2022 - 2024

Dalam nominal, realisasi PMA tercatat sebesar Rp. 3,5 Triliun di Tahun 2022, Rp. 6,6 Triliun di Tahun 2023, dan Rp. 7,5 Triliun di Tahun 2024. Rata-rata pertumbuhannya sebesar Rp. 2 Triliun per tahunnya. Selama Periode Tahun 2022 s/d 2024, Realisasi Investasi PMDN sebesar Rp. 9,0 Triliun di Tahun 2022, Rp. 5,5 Triliun di Tahun 2023, dan Rp. 5,3 Triliun di Tahun 2024. Rata-rata penurunannya sebesar Rp. 2 Triliun per tahunnya.

Tingginya realisasi investasi ditopang oleh beberapa sektor, yakni Industri Makanan (44%), Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain (21%), Industri Kimia dan Farmasi (20%), Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (6%) serta Industri Lainnya (3%) yang cenderung stabil mendominasi selama 3 tahun terakhir.

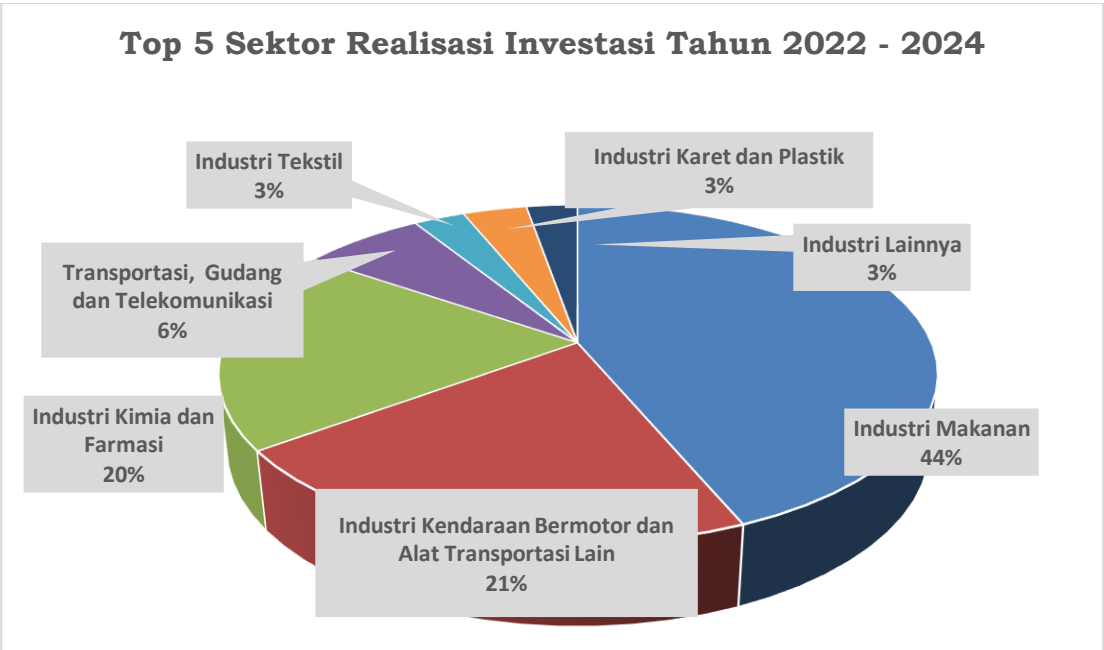


Diagram Top 5 Sektor Realisasi Investasi Tahun 2022 - 2024

Sedangkan, 5 besar realisasi investasi PMA didominasi investor dari : Jepang (51%), Singapura (26%), Korea Selatan (12%), Belanda (6%), Luxemburg (5%) yang cenderung stabil mendominasi selama 3 tahun terakhir. Masing-masing investor PMA memiliki preferensi sektor yang mendominasi investasi di Kabupaten Pasuruan.

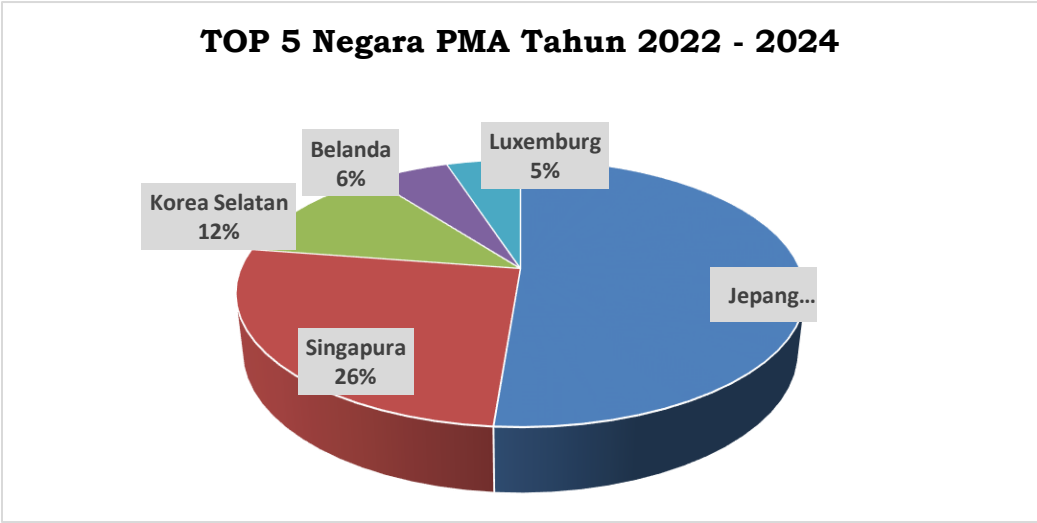


Diagram Top 5 Negara Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2022 - 2024

Sedangkan untuk Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2020 nilai realisasi IKM sebesar 85.23 dan terjadi peningkatan di tahun selanjutnya, yaitu 87.45 di tahun 2021, 93.95 di tahun 2022, 93.57 di tahun 2023, dan 95.8 di tahun 2024. Masing – masing capaian di tiap tahun tersebut mampu mengungguli target realisasi yaitu mencapai 102.68 %, 104.73 %, 111.84 %, 110.73 % dan 112.71 %.

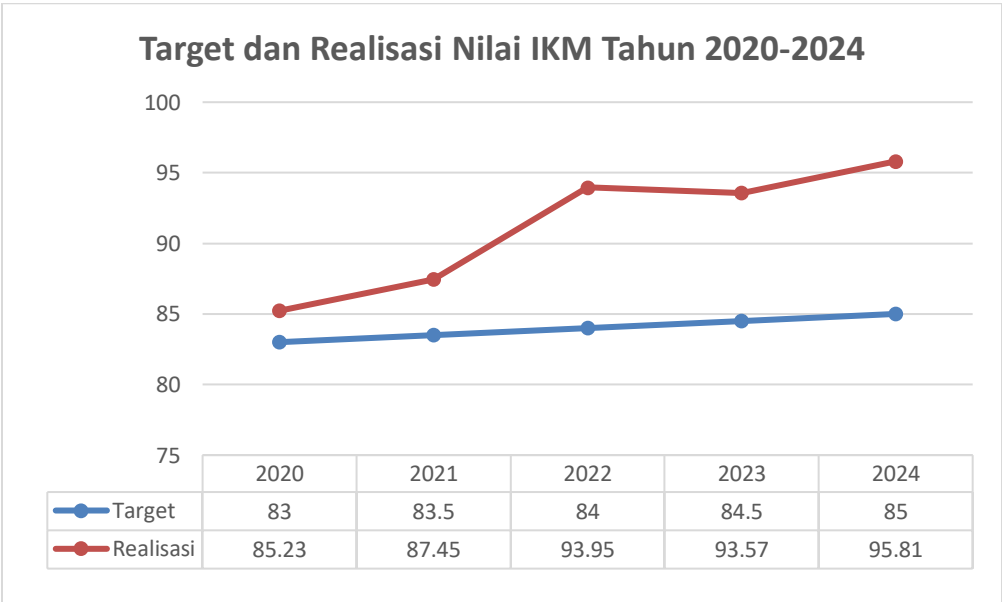


Diagram Target dan Realisasi Nilai IKM Tahun 2020 - 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan merupakan instansi teknis yang menangani masalah Penanaman Modal di Kabupaten Pasuruan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan 198 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang melaksanakan amanat untuk menciptakan iklim investasi yang menarik dan mendorong pemerataan investasi keseluruhan wilayah Kabupaten Pasuruan. Dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Bupati, yang dijabarkan kedalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Sebagai instansi yang bertanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan perizinan di berbagai sektor, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasuruan berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Melalui berbagai bentuk pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan efisien, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan memastikan bahwa setiap proses yang berkaitan dengan izin usaha dapat dilakukan dengan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan melayani berbagai jenis perizinan, mulai dari perizinan baru, perubahan, hingga perpanjangan, DPMPTSP mendukung berbagai sektor seperti penanaman modal, perdagangan, industri, pertanian, dan pariwisata untuk berkembang. Keberagaman bidang yang dilayani ini menunjukkan betapa pentingnya peran DPMPTSP dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan investasi di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, pelayanan yang optimal dari DPMPTSP tidak hanya mempercepat realisasi investasi, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang semakin menarik bagi investor.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan diukur dengan beberapa indikator yang berkenaan dengan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Pasuruan pada periode Renstra sebelumnya disajikan dalam matrik dan tabel perkembangan jumlah pelayanan perizinan, nilai investasi, target serta Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) selain itu juga disajikan capaian kinerja pada periode Renstra saat ini hingga tahun 2025 tribulan ke 1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Kinerja Lima Tahun Terakhir

NO	Indikator Kinerja Renstra 2025-2029	Standar NSPK	Kondisi				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indikator Tujuan						
	Nilai Realisasi Investasi		10,01 T	8,36 T	12,6 T	12,25 T	12,85 T
	Indikator Sasaran						
	Persentase peningkatan investor				82,15%	3,83%	7,83%
	jumlah pelaku usaha (berNIB)			2.943	16.492	17.149	18.605
				(Agustus-Desember)			
	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)		83,5	87,45	93,92	94,30	95,81
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPMPTSP			82,13	84,49	83,85	84,55
	Indikator IKK						
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota / Kota			-16,43%	50,61%	-2,81%	5,30%
	jumlah realisasi investasi		10.012.281.721.669,00	8.366.891.562.869,00	12.601.392.012.349,00	12.247.178.649.713,00	12.895.939.500.000,00

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasuruan, selain fokus pada indikator peningkatan nilai investasi daerah, ada beberapa aspek yang juga dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan misi daerah. Aspek-aspek ini dapat meliputi:

I. Mal Pelayanan Publik

Mal Pelayanan Publik (MPP) hadir sebagai inovasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Melalui konsep “satu tempat untuk semua layanan”, MPP mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dari instansi pusat, daerah, BUMN, BUMD, hingga swasta, sehingga masyarakat dapat mengurus kebutuhan administrasi dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. Kehadiran MPP diharapkan mampu menjawab tuntutan era modern yang mengutamakan efisiensi, kepastian, serta kenyamanan dalam memperoleh layanan publik. Mal pelayanan publik Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa layanan antara lain :

a. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan, dengan layanan Perizinan & Non-Perizinan:

- 1) Konsultasi / Informasi Layanan Perizinan Berusaha & Non-Berusaha
- 2) Penerimaan Berkas Perizinan
 - ✓ Informasi Peil Banjir
 - ✓ Rekomtek Penentuan Jenis Pemanfaatan Tanah Irigasi Daerah
 - ✓ Izin Pemakaian Tanah Irigasi Daerah
 - ✓ Informasi Batas Tanah Sempadan Irigasi
 - ✓ Izin Pemakaian Tanah Sempadan Jalan Kabupaten Pasuruan
 - ✓ Surat Pengantar Permohonan Penyewaan Tanah Serta Sarana Prasarana Lementrian Pekerjaan Umum DPU, BM
 - ✓ Izin Perubahan Aliran
 - ✓ Izin Permohonan Rekomtek Reklame
 - ✓ Pengaduan Perizinan
- 3) Konsultasi Persyaratan Teknis dengan OPD Teknis
 - ✓ Konsultasi Dokumen Lingkungan
 - ✓ Konsultasi SIMBG
 - ✓ Informasi Tata Ruang / KRK
 - ✓ Konsultasi Dokumen Andalalin
 - ✓ Konsultasi SIP Dokter, dll.
- 4) Pendampingan SIAPMASLAHAT atau SMART
 - ✓ Sektor Pendidikan
 - ✓ Sektor Kesehatan

- ✓ Sektor Pariwisata
 - ✓ Sektor Peternakan
 - ✓ Sektor Perikanan
 - ✓ Sektor Sosial
 - ✓ Sektor Pekerjaan Umum (PUPR)
- b. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dengan layanan Terintegrasi secara langsung dengan HaloJPN, program kerja JA Republik Indonesia yg membuka akses pelayanan kepada publik memberikan jasa konsultasi di bidang perdata
- c. Pengadilan Negeri dengan layanan konsultasi hukum
- d. Bank Jatim dengan layanan:
- 1) Buka Rekening Baru/Tabungan.
 - 2) Setor dan Tarik Tunai.
 - 3) Pembayaran Listrik, BPJS Cicilan, Retribusi, Pajak dan Multipayment.
- e. Polres Kabupaten Pasuruan, dengan layanan:
- 1) Perpanjangan SKCK
 - 2) Legalisir SKCK
- f. Samsat Unggulan, dengan layanan:
- 1) Pengesahan Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan
 - 2) Menerima pembayaran PKB dan SWDKLLI
- g. Dispendukcapil, dengan layanan:
- 1) Kartu Keluarga
 - 2) KTP
 - 3) Akta Lahir
 - 4) Akta Mati
 - 5) Surat Pindah
 - 6) Kartu Identitas Anak
 - 7) Perekaman KTP
 - 8) Cek Biometrik
 - 9) Aktivasi NIK
 - 10) Legalisir
- h. Dinas Tenaga Kerja, dengan layanan:
- 1) Penerbitan Kartu Antar Kerja (AK.I)
 - 2) Informasi Lowongan Kerja (Job Vacancy) dan Konsultasi Kerja (Job Counseling)
 - 3) Penerbitan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus
 - 4) Rekom Passpor bagi CPMI
 - 5) Penerbitan Surat Lapo Keberadaan bagi TKA

- 6) Informasi dan Pendaftaran Pelatihan Kerja
- i. BPJS Kesehatan
 - 1) Pendaftaran Kepesertaan Anggota BPJS.
 - 2) Perubahan Data BPJS Kesehatan.
 - 3) Konsultasi BPJS Kesehatan
- j. BPJS Ketenagakerjaan
 - 1) Pendaftaran Kepesertaan Anggota BPJS (Perusahaan, Instansi, Usaha Mikro/Kecil BPU/Tenaga Kerja Mandiri.
 - 2) Pencetakan Bukti Kebersertaan secara Elektronik (Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan).
 - 3) Perubahan Data BPJS Ketenagakerjaan.
 - 4) Pelayanan Klaim JHT melalui JMO
 - 5) Pelayanan klaim pelaporan JKK
 - 6) Konsultasi BPJS Ketenagakerjaan
- k. Pos Indonesia
 - 1) Pelayanan e- pospay (pembayaran pajak (PPH), Paport, PBB, Non PBB, Telokm, PDAM Listrik).
 - 2) Pengiriman surat atau barang.
 - 3) Pengiriman kirim/Transfer uang.
 - 4) Multipayment.
 - 5) Pembayaran denda tilang.
- l. LPSE
 - 1) Pendampingan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
 - 2) Verifikasi penyedia baru.
 - 3) Perubahan data penyedia.
 - 4) Konsultasi terkait penyedia barang jasa melalui LPSE
- m.KPP PRATAMA
 - 1) Laporan SPT Tahunan
 - 2) NPWP Baru
 - 3) Konsultasi Pajak
- n. KEMENTERIAN AGAMA
 - 1) Konsultasi Pendaftaran Haji
 - 2) Konsultasi Wakaf, Waris, Cerai, Rujuk
 - 3) Konsultasi dan Bimbingan Keagamaan
 - 4) Konsultasi dan Bimbingan Perkawinan
 - 5) Pengajuan Perkawinan / Perceraian (administrasi)
 - 6) Konsultasi Perizinan Pendirian Madin dan TPQ
 - 7) Pelayanan Sertifikasi Halal

o. ATR/BPN Kabupaten Pasuruan

- 1) Peralihan Hak (Jual Beli, Waris, Hibah, Pembagian Hak Bersama, Lelang, Tukar menukar)
- 2) Pertimbangan Teknis (Pertek)
- 3) Konsultasi Pertanahan.

p. PDAM Giri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan

- 1) Pembayaran Rekening PDAM
- 2) Pengaduan
- 3) Pemasangan Baru

q. Mandiri Taspen

- 1) Pembayaran Pensiunan Pertama, Pembayaran Pensiunan Janda/Duda/Yatim
- 2) Pencairan Uang Duka/Wafat
- 3) Layanan Asuransi Kematian/Meninggal Dunia
- 4) Layanan Non-Klaim:
 - ✓ Mutasi Keluarga & Kantor Bayar
 - ✓ Pencetakan KPT (Kartu Peserta Taspen)
 - ✓ Pengusulan SK Janda/Duda/Yatim
 - ✓ Pengusulan Pendaftaran Keluarga
- 5) Layanan Pensiunan

r. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

- 1) Konsultasi Pajak Daerah
- 2) Pendaftaran NPWPD
- 3) Cetak SKPD dan Kode Biling
- 4) Surat Keterangan NJOP PBB
- 5) SPPT PBB (Daftar Baru, Perubahan/Mutasi Objek atau Subjek serta Salinan)
- 6) Pelayanan BPHTB

s. Layanan IMIGRASI

- 1) Pelayanan permohonan paspor baru dan paspor penggantian, tetapi tidak termasuk permohonan paspor karena hilang dan rusak
- 2) Pelayanan pengambilan paspor; dan
- 3) Pelayanan informasi keimigrasian

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, profesional, dan berwibawa, setiap kebijakan daerah perlu dituangkan dalam bentuk regulasi yang jelas dan terarah. Salah satu aspek penting dalam mendukung kinerja aparatur sipil negara adalah penetapan pakaian dinas sebagai identitas serta simbol kedisiplinan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Bupati Pasuruan menetapkan sebuah keputusan yang mengatur pakaian dinas bagi petugas layanan pada perangkat daerah tertentu. Hal ini tertuang dalam **Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 800.1.12.5/616/HK/424.013/2025** sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar Surat Keputusan Bupati terkait Pakaian Dinas Petugas Layanan Perangkat Daerah Tertentu

Dengan adanya keputusan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat menerapkan aturan terkait pakaian dinas secara konsisten sehingga tercipta keseragaman, kedisiplinan, serta citra positif aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan pakaian dinas bukan sekadar aturan administratif, tetapi juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam membangun profesionalitas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan.

Dengan adanya Mal Pelayanan Publik, diharapkan kualitas pelayanan pemerintah semakin meningkat melalui penyediaan layanan yang cepat, transparan, dan terintegrasi. MPP bukan hanya menjadi sarana fisik, tetapi juga simbol transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

II. Kantor Imigrasi Kelas 3

Dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan publik di bidang keimigrasian serta menunjang kelancaran mobilitas tenaga kerja, pelajar, dan pelaku usaha internasional dari dan menuju Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyatakan kesanggupan penuh untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi pembentukan Kantor Imigrasi di Bangil sebagai bagian dari upaya strategis pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan sanggup menyediakan gedung operasional yang layak dan sesuai standar pelayanan publik untuk mendukung berjalannya seluruh fungsi administrasi dan teknis Kantor Imigrasi. Lokasi gedung akan dipilih dengan mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat, keamanan, dan integrasi dengan infrastruktur pemerintahan serta layanan publik lainnya.

Selain itu, dukungan personil administratif dari pemerintah daerah juga akan disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Personil yang ditugaskan akan diberikan pelatihan dasar mengenai tugas pendukung operasional imigrasi, serta dikoordinasikan secara aktif dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia guna menjamin kelancaran transisi dan pembentukan struktur organisasi kantor.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga menyatakan komitmen untuk mengalokasikan anggaran yang diperlukan melalui mekanisme penganggaran daerah, baik untuk kebutuhan awal operasional maupun dukungan teknis lainnya. Komitmen anggaran ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas pelayanan publik dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keimigrasian yang cepat, mudah, dan terjangkau.



Gambar Surat Pernyataan Komitmen Bupati Pasuruan untuk mendukung dan memfasilitasi pembangunan Kantor Imigrasi di wilayah Kabupaten Pasuruan

Berikut secara detail beberapa hal yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk pembentukan Kantor Imigrasi Bangil di Bangil Kabupaten Pasuruan:

a. Lokasi

Lokasi yang telah terbangun untuk Kantor Imigrasi Bangil di Bangil Kabupaten Pasuruan berada di Jalan Dr. Soetomo yang dulunya merupakan kawasan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil.

b. Luas Lahan dan Luas Bangunan

Bangunan Kantor Imigrasi Bangil terbangun di atas hamparan lahan seluas ± 1,5 ha, dengan bangunan seluas ± 624 m².

c. Fasilitas yang Tersedia

Selain untuk Kantor Imigrasi Bangil, terdapat beberapa bangunan yang sudah terbangun pada kawasan tersebut, seperti LABKESDA (Laboratorium Kesehatan Daerah) dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan. Keberadaan LABKESDA yang berdekatan, tentunya akan sangat mendukung kegiatan keimigrasian. LABKESDA ini nantinya akan memberikan kemudahan para pemohon penerbitan paspor jama'ah haji/umroh untuk memperoleh vaksin sebelum mereka pergi ke tanah suci. Sedangkan keberadaan Dinas Tenaga

Kerja dengan layanan keimigrasian sangat erat kaitannya dengan pengelolaan Tenaga Kerja Asing (TKA) serta perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dan untuk mempermudah proses pembayaran paspor, akan disediakan pula PT. Pos Indonesia pada lokasi tersebut.

d. Sarana dan Prasarana

Selain keberadaan gedung yang telah terbangun, beberapa sarana penunjang seperti peralatan yang dibutuhkan untuk layanan keimigrasian telah disediakan sejak tahun 2024. Peralatan-peralatan yang telah dibelanjakan didanai menggunakan anggaran tahun 2024 tersebut, antara lain Printer Stiker Ijin Tinggal WNA, Scanner Sidik Jari, Kamera Digital, Printer ID Card, Mesin Laminasi, Printer Paspor, Scanner MRTD, Scanner Berkas, Signature Pad, UPS Server, Server, Rak Server, Printer, Desktop PC, Kontrol Server, Switch 24 Port, serta Notebook.

e. Anggaran Untuk kebutuhan pelayanan di bidang keimigrasian,

Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memberikan dukungan penuh di bidang penganggarnya. Hal ini dibuktikan dengan telah direalisasikannya belanja untuk kebutuhan keimigrasian pada tahap I di tahun 2024 sebesar ± Rp 1.543.183.700 dan pada tahun 2025 telah direncanakan penganggaran pada tahap II untuk revitalisasi bangunan Kantor Imigrasi senilai ± Rp. 1.147.424.730.

f. Sumber Daya Manusia

Kebutuhan personil untuk mencukupi kebutuhan Kantor Imigrasi Bangil dilakukan dengan menyediakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang siap untuk dimutasikan menjadi pegawai kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia.

Dengan adanya kesanggupan ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III di Bangil Kabupaten Pasuruan dapat segera direalisasikan sebagai bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong kemudahan layanan serta pertumbuhan ekonomi berbasis globalisasi tenaga kerja investasi.

III. Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD)

Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) merupakan pelayanan publik berbasis elektronik Pemerintah Daerah yang terintegrasi ke dalam satu platform. Kehadiran MPP Digital merupakan bentuk kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan berbagai kementerian, yang

diharapkan dapat mengakselerasi kegiatan pelayanan publik, selain itu hadirnya MPPD merupakan bagian dari strategi percepatan di bidang pelayanan publik, termasuk peningkatan investasi.

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Publik (MPP) menjadi landasan hukum awal transformasi menuju Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD). Selain itu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi petunjuk teknis operasional termasuk digitalisasi layanan, penggunaan teknologi dan kerjasama antar instansi.

MPP Digital menggunakan metode single sign on yang diterapkan pada semua lini pelayanan publik di lingkup pemerintah daerah, dimana pengguna layanan dapat mengakses semua layanan hanya dengan menggunakan satu akun saja dan cukup sekali mengunggah dokumen persyaratan layanan. Pada tahap awal MPP Digital akan melayani layanan pada administrasi kependudukan dan perizinan tenaga kesehatan.

MPP Digital saat ini juga telah hadir di DPMPSTSP Kabupaten Pasuruan. Kehadirannya diawali dengan pelayanan pada perizinan tenaga kesehatan. Pengguna layanan pada sektor kesehatan langsung dapat mengajukan permohonan perizinannya tanpa harus datang ke MPP terlebih dahulu. Para tenaga kesehatan cukup mengunduh aplikasi MPP Digital melalui gadget yang dimiliki serta dapat diakses dengan mudah dimanapun keberadaan mereka. Kemudahan dalam melakukan registrasi, efisiensi waktu dan biaya, serta transparansi proses juga menjadi beberapa keuntungan yang didapatkan oleh para pengguna layanan. Keberadaan MPP Digital juga mempermudah pemerintah dalam melakukan pendataan dan perencanaan SDM Kesehatan karena semua data telah terekam secara digital.

Adanya Layanan MPP Digital pada sektor Kesehatan yang terhubung pada sistem SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan). Perizinan Praktek tenaga medis dan Tenaga kesehatan.

IV. Aplikasi SIAP MASLAHAT (Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Maju, Aman, Sehat Lahir-batin, Adil dan Bermatabat)

Dengan adanya inovasi pengembangan sistem Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu munculnya Aplikasi SMART (Sistem Management Administrasi Perizinan Terpadu)

Merupakan pengembangan sistem aplikasi perizinan secara online yang dibangun pada aplikasi perdana yaitu SIAP MASLAHAT dimana aplikasi tersebut

adalah aplikasi yang lokal yang tidak mengcover perizinan pada sistem OSS. Hal ini membawa dampak bagi aktivitas pelayanan publik dari DPMPTSP Kabupaten Pasuruan.

Terbitnya PP No. 24 Tahun 2018 mengenai Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut sebagai OSS berdampak besar terhadap revolusi sistem pelayanan publik di Indonesia.

Pelimpahan wewenang perizinan dan non-perizinan DPMPT oleh Bupati Kab. Pasuruan mengalami perubahan beberapa kali. Perbup Pasuruan No. 88 Tahun 2019 menjelaskan DPMPT melayani 84 jenis dokumen. Seiring dengan sosialisasi OSS, kewenangan DPMPT dirampingkan untuk melayani 21 jenis dokumen (PerBup Pasuruan No. 63 Tahun 2020). Selanjutnya, Perbup Pasuruan No. 126 Tahun 2021 lebih merincikan kembali dengan membagi kategori izin menjadi KBLI (dengan OSS RBA), Non-KBLI dan non-perizinan.

Era transformasi digital melalui PP No. 95/2018 mendorong digitalisasi pelayanan publik dengan keras. Data menunjukkan bahwa persentase terbit dokumen di tahun 2020 sebesar 80.89% (tidak termasuk OSS). Sehingga, DPMPTSP Kab. Pasuruan merancang program perizinan dan non-perizinan elektronik yang belum difasilitasi oleh OSS-RBA melalui portal <https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id/> yang selanjutnya disebut sebagai SIAPMASLAHAT.

SIAPMASLAHAT diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada pengguna dalam memperoleh layanan legalitas perizinan dan non perizinan.

SIAPMASLAHAT adalah inovasi yang sedang dioptimalikan oleh DPMPTSP Kabupaten Pasuruan untuk mensiasati pelayanan publik di masa ini. Setiap OPD teknis digandeng untuk bekerjasama memberikan pelayanan perizinan maupun non-perizinan. Peran penting koordinasi menjadi hal utama, meskipun kini tidak lagi harus bertatap muka.

Di tahun 2025 kami mengembangkan sistem aplikasi guna penyempurnaan sistem baru yang dinamakan SMART (Sistem Management Administrasi Perizinan Terpadu). Keunggulan sistem ini adalah sudah terintegrasi dengan OPD Tekhnis, terintergrasi pembayaran Virtual Account dengan per bankkan, Trakcing pelaporan izin bisa di lihat per tanggal. Dengan demikian memudahkan bagi pemohon untuk mentrakcing pengajuan perizinannya melalui sistem tanpa harus datang ke Mall Pelayanan Publik.

V. Aplikasi SMART (Sistem Management Administrasi Perizinan Terpadu)

Dengan adanya inovasi pengembangan sistem Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu munculnya Aplikasi SMART (Sistem Management Administrasi Perizinan Terpadu). SMART merupakan pengembangan sistem aplikasi perizinan secara online yang dibangun pada aplikasi perdana yaitu SIAP MASLAHAT dimana aplikasi tersebut adalah aplikasi yang lokal yang tidak mengcover perizinan pada sistem OSS. Hal ini membawa dampak bagi aktivitas pelayanan publik dari DPMPTSP Kabupaten Pasuruan.

Pada dalam tahapan pengembangannya, sistem aplikasi baru yang dinamakan SMART (Sistem Management Adinistrasi Perizinan Terpadu) ini memiliki keunggulan daripada sistem aplikasi sebelumnya (SIAP MASLAHAT). Keunggulan sistem ini adalah sudah terintegrasi dengan OPD Tekhnis, terintergrasi pembayaran Virtual Account dengan per bankkan, Trakcing pelaporan izin bisa di lihat per tanggal. Dengan demikian memudahkan bagi pemohon untuk mentrakcing pengajuan perizinannya melalui sistem tanpa harus datang ke Mall Pelayanan Publik.

Dengan hadirnya aplikasi SMART sebagai inovasi pengembangan sistem pelayanan perizinan, DPMPTSP Kabupaten Pasuruan menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Integrasi sistem dengan OPD teknis, kemudahan pembayaran melalui Virtual Account, serta fitur pelacakan izin secara real-time menjadi nilai tambah yang signifikan dibandingkan sistem sebelumnya. Melalui pemanfaatan teknologi ini, masyarakat kini dapat mengakses layanan perizinan dengan lebih mudah tanpa harus datang langsung ke Mall Pelayanan Publik, sehingga mendukung terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif sesuai dengan prinsip pelayanan prima.

VI. PAMERAN SKALA NASIONAL

Pameran Skala Nasional merupakan agenda tahunan yang rutin diselenggarakan dan diikuti oleh DPMPTSP sebagai ajang promosi potensi daerah. Kegiatan ini menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan kekayaan dan keunggulan yang dimiliki Kabupaten Pasuruan kepada masyarakat luas dalam lingkup nasional. Dengan partisipasi aktif dalam pameran tersebut, daerah memiliki kesempatan untuk menampilkan identitas, karakteristik, serta potensi unggulannya secara lebih terarah dan profesional.

Melalui keikutsertaan dalam pameran berskala nasional ini, Kabupaten Pasuruan dapat menunjukkan eksistensinya sekaligus memperkenalkan produk-produk unggulan dari setiap kecamatan kepada publik. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengamatan dan pembelajaran dari perkembangan yang ditampilkan oleh kabupaten maupun kota lain. Dengan demikian, partisipasi dalam pameran nasional tidak hanya sebatas promosi, tetapi juga menjadi momentum penting untuk meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional.



Gambar Investment Gathering di Mall Kota Kasablanka, Jakarta

VII. INVESTMENT GATHERING

Investment Gathering merupakan sebuah forum strategis yang mempertemukan para pengusaha dengan Kepala Daerah serta jajaran dinas terkait. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang lebih intensif antara dunia usaha dan pemerintah daerah. Melalui pertemuan ini, tercipta ruang dialog yang kondusif sehingga para pelaku usaha dapat memperoleh informasi terkini mengenai arah kebijakan dan iklim penanaman modal di daerah.

Investment Gathering merupakan sebuah forum strategis yang mempertemukan para pengusaha dengan Kepala Daerah serta jajaran dinas terkait. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang lebih intensif antara dunia usaha dan pemerintah daerah. Melalui pertemuan ini, tercipta ruang dialog yang kondusif sehingga para pelaku usaha dapat memperoleh informasi terkini mengenai arah kebijakan dan iklim penanaman modal di daerah.



Gambar Investment Gathering

VIII. ZONA INTEGRITAS (WBK)

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Zona Integritas (ZI) merupakan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja yang bertujuan membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah telah menjelaskan bahwa proses pembangunan Zona Integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu pencanangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan.

Tahapan yang paling penting dalam Zona Integritas adalah pembangunan itu sendiri. Pembangunan berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, massif, komprehensif, dan sistematis. Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya.

Membangun sistem berarti membangun berbagai instrumen, SOP, dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi/perbuatan tercela lainnya. Sebagai contoh, membangun sistem pengendalian gratifikasi, membangun

Whistleblowing System (WISE), membangun sistem pengendalian intern, dan lainnya.

Membangun manusia berarti membangun mindset aparaturnya pemerintah untuk enggan, malu, dan merasa bersalah melakukan tindak pidana korupsi/tindakan tercela lainnya. Proses membangun mindset tidaklah mudah, karena akan ditemukan keengganan bahkan penolakan. Selain itu pula diperlukan waktu yang tidak singkat dengan pembiasaan yang terus menerus.

Masih banyak yang harus dikerjakan, tak perlu ragu memantapkan diri menuju zona nyaman baru ini. Pada akhirnya, efektivitas Zona Integritas sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pegawai di dalamnya. Berbagai success story pembangunan Zona Integritas di Indonesia dan di negara lainnya menunjukkan bahwa komitmen menjadi prasyarat (prerequisite) sebuah instansi yang berintegritas. Jika komitmen kuat, maka mewujudkan institusi yang bersih dan melayani melalui Zona Integritas akan menjadi sebuah keniscayaan. Namun jika komitmen lemah, cita-cita menjadi zona integritas hanya akan menjadi sebatas angan dan pencitraan.

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Zona Integritas adalah sebuah konsep yang berasal dari konsep island of integrity. Island of integrity atau pulau integritas biasa digunakan oleh pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah (NGO) untuk menunjukkan semangatnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Terdapat dua kata kunci dalam Zona Integritas, yaitu integrity ataupun integritas dan island/zone atau pulau/kepulauan.

Integrity atau integritas diartikan sebagai sikap ataupun budaya yang menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan serta sikap untuk menolak segala tindakan tercela yang dapat merugikan diri dan instansinya. Adapun zona atau island digambarkan dengan unit-unit instansi pemerintah yang telah menanamkan nilai integritas di dalamnya.

Salah satu hal yang juga menjadi penekanan pada Zona Integritas adalah bahwa sangat memungkinkan lahirnya zona-zona/island-island baru yang juga ikut menerapkan sistem integritas di dalamnya. Munculnya island baru ini dimungkinkan melalui proses replikasi oleh unit instansi pemerintah lainnya kepada unit instansi pemerintah yang telah menanamkan sistem integritas terlebih dahulu.

Selain zona integritas sebagai role model reformasi birokrasi, terdapat sebuah konsep tatanan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi. konsep tersebut adalah good governance. Good governance diartikan sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan ditandai adanya pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang bersifat terbuka terhadap kritik dan kontrol sepenuhnya ada pada rakyat.

Menurut Bank Dunia, Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Dari uraian di atas, konsep good governance tidak hanya berlaku di instansi pemerintahan saja, namun juga berlaku di organisasi non pemerintah (NGO) ataupun di dunia usaha. Good governance adalah pengejawantahan sebuah proses bisnis yang tidak hanya efektif dan efisien saja, namun juga bersih dan bebas dari korupsi.

Good governance sebenarnya sudah mulai dikenal oleh Indonesia sejak era 1990-an setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional, yaitu Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan International Monetary Fund (IMF), menetapkan “good governance” sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka. Namun, Indonesia mulai benar-benar merintis dan menerapkannya sejak era reformasi birokrasi. Sejak era tersebutlah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih.

Dalam mewujudkan good governance harus memahami prinsip-prinsip di dalamnya. Dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan, apakah berkinerja baik atau tidak. Menurut UN Development Program (UNDP, good governance memiliki delapan prinsip yaitu participation, responsiveness, consensus, accountability, transparency, rule of law, strategic vision, serta fairness.

Participation atau partisipasi memiliki arti setiap warga negara memiliki kesetaraan suara dalam pembuatan kebijakan. Responsiveness atau responsif memiliki arti tanggap atas kebutuhan stakeholder dalam pengelolaan lembaganya. Consensus atau konsensus yaitu Organisasi dalam melakukan pengambilan keputusan harus dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai konsensus atau kesepakatan bersama. Melalui konsensus tersebut dapat menjembatani perbedaan

kepentingan diantara masyarakat, agar tercipta keputusan yang memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak.

Accountability atau akuntabilitas yaitu kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perangkat lembaga kepada stakeholder secara efektif. Transparency atau transparansi adalah adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi yang relevan dalam pengambilan kebijakan. Rule of Law atau Supremasi Hukum adalah penegakan aturan atau hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Strategic Vision atau Visi Strategis adalah visi yang luas dan berjangka panjang untuk memperbaiki dan menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi. Fairness atau kesetaraan dan kewajaran yaitu perlakuan yang adil atas seluruh masyarakat dalam memenuhi hak-hak untuk meningkatkan taraf hidupnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.

Sejalan dengan good governance, tujuan utama dalam pembangunan ZI menuju WBK-WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam implementasinya adalah dengan senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja, menyusun kontrak kinerja dan mengadakan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi.

Di dalam ZI menuju WBK-WBBM terdapat enam aspek pembangunan. Enam aspek pembangunan tersebut adalah Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pada Aspek Manajemen Perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan cultureset (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, professional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Aspek ini memerlukan partisipasi seluruh anggota untuk mewujudkannya.

Pada Aspek Penataan Tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Pada aspek ini juga bertujuan untuk mewujudkan kebijakan keterbukaan publik.

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK-WBBM.

Penguatan Akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Dari ke enam aspek tersebut, seluruh prinsip good governance ada di dalamnya. Pada prinsip participation dan consensus terdapat di dalam aspek manajemen perubahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada prinsip responsiveness dan fairness terdapat di dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada prinsip accountability dan strategic vision terdapat di dalam aspek penguatan akuntabilitas. Pada prinsip transparency terdapat pada aspek penataan dan tatalaksana. Berdasarkan hal tersebut, unit kerja yang telah berhasil membangun ZI menuju WBK-WBBM merupakan unit kerja yang telah mewujudkan good governance.



Gambar DPMPTSP Kabupaten Pasuruan mendapatkan predikat WBK

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada

komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pada Tanggal 06 Desember 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan mendapatkan predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi dalam pembangunan Zona Integritas yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berkenaan dengan predikat yang diberikan tersebut maka DPMPSTP Kabupaten Pasuruan berusaha terus memberikan pelayanan berkualitas prima yang berintegritas.

IX. PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK DARI OMBUDSMAN

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tentang pelayanan publik menyebutkan 12 asas pelayanan public. Salah satunya yaitu :

Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman adalah bentuk pengawasan yang dilakukan untuk memastikan instansi pemerintah dan lembaga publik memberikan layanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Ini bertujuan untuk mencegah mal administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan public.

Tujuan utama Penilaian Kepatuhan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencegah maladministrasi, dan memastikan bahwa pelayanan publik diberikan secara adil dan transparan kepada seluruh masyarakat.

Piagam penghargaan ini di raih oleh DPMPSTP pada capaian kinerja tahun 2024 dengan predikat Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik **ZONA HIJAU** nilai **97,55**



Gambar DPMTSP Kab. Pasuruan Mendapat Piagam Penghargaan dari
OMBUDSMAN RI

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

DPMTSP memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. DPMTSP memberikan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada penanam modal, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri baik perseorangan ataupun badan usaha yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang temaktub dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Kelompok sasaran yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut:

- Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan
- Pelaku Usaha
- Masyarakat Umum Penanaman Modal.

Pelaku usaha yang menggunakan layanan DPMTSP Kabupaten Pasuruan berasal dari pengusaha dari berbagai sector, seperti:

- Pelaku usaha sektor peternakan
- Pelaku usaha sektor perikanan
- Pelaku usaha sektor pariwisata
- Pelaku usaha sektor kesehatan
- Pelaku usaha sektor pertanian

- Pelaku usaha sektor industry
- Pelaku usaha sektor ekonomi kreatif dan sebagainya.

Pelaku usaha tersebut memanfaatkan beberapa layanan yang disediakan DPMPTSP Kabupaten Pasuruan di Mall Pelayanan Publik Maslahat Kabupaten Pasuruan.

Terkait pelayanan kepada penanam modal dan pelaku usaha DPMPTSP Kabupaten Pasuruan menghadapi berbagai tantangan dan memiliki beberapa peluang yang dihadapi. Tantangan dan peluang menjadi faktor dimana suatu instansi bisa mengoptimalkan strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan.

a. Tantangan

1. Belum optimalnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam mendukung percepatan proses perizinan.
2. Potensi daerah lain yang tidak kalah menarik yang berusaha menarik investor ke daerahnya.

b. Peluang

Disamping adanya tantangan tersebut terdapat beberapa peluang yang dapat dijadikan pijakan bagi pengembangan layanan kepada masyarakat, antara lain:

1. Adanya regulasi, baik yang mengatur mengenai Penanaman Modal maupun Pelayanan Perizinan.
2. Terbukanya peluang kerjasama antar pemerintah daerah, instansi pemerintah dan dunia usaha.
3. Banyaknya potensi investasi daerah
4. Terbukanya peluang dan kesempatan dari Pemerintah Pusat/ Provinsi untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan mengadakan Pendidikan dan pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek), workshop, seminar dan lain-lain.
5. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih dan terjangkau, sehingga dapat dimanfaatkan untuk penerapan e-perizinan dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Tantangan dan peluang tersebut memberikan landasan untuk menyusun strategi pemecahan permasalahan yang akan diterjemahkan dalam rencana strategis, maupun dalam rencana kerja pada tahun yang akan datang.

Langkah strategis dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pasuruan antara lain:

1. Melaksanakan promosi peluang investasi terhadap potensi unggulan Kabupaten Pasuruan baik di dalam maupun di luar daerah;
2. Memetakan potensi investasi dan menyajikannya pada peta dan data peluang investasi Kabupaten Pasuruan;
3. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Dalam pelaksanaan program penyelenggaraan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memiliki acuan berupa Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Pasuruan, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) serta telah memperoleh Sertifikat ISO (International Standard Of Organization) 9001 : 2015.

Dengan adanya acuan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan dapat melaksanakan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya beberapa hal yang belum dapat dilaksanakan secara optimal dan perlu dilakukan perbaikan dan penjagaan mutu yang berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan serta Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 503/878/HK/424.013/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai OPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat tentunya dalam menjalankan tugas dan fungsinya menemui berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan terkait urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sebagai berikut:

1. Belum adanya Perda Penanaman Modal, RUPM dan Perda Kebijakan Insentif untuk mendorong investasi;

2. Belum adanya kebijakan pemberian insentif daerah kepada pelaku usaha;
3. Belum Optimalnya penawaran peluang investasi / kurangnya promosi investasi yang terpadu dan berbasis data potensial;
4. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap legalitas usaha;
5. Belum tersedianya pemetaan produksi dari UMK yang dimungkinkan sebagai rantai pasok komponen/bahan baku untuk perusahaan PMA/PMDN;
6. Belum maksimalnya persentase penerbitan perizinan berusaha yang tepat waktu sesuai SOP
7. Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dalam penyampaian LKPM;
8. Minimnya investasi ekonomi berbasis ekonomi hijau dan berkelanjutan;
9. Belum ada kerjasama penanaman modal antara pemerintah dengan dunia usaha;
10. Terbatasnya interoperabilitas data dan sistem informasi penanaman modal.

2.2.2 Isu Strategis

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, dimana faktor internal terdiri dari kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*) dan faktor eksternal terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

Dari hasil telaahan terhadap dokumen rencana strategis kementerian investasi dan dokumen rencana strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Timur maka ada beberapa hal yang bisa diidentifikasi sebagai kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Beberapa hasil identifikasi tersebut antara lain:

Identifikasi faktor internal :

a. Kekuatan (strength)

1. Adanya potensi investasi wilayah
2. Mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang sebagian menguasai bidangnya

3. Mempunyai sarana dan prasarana
4. Adanya komitmen pimpinan daerah sebagai pendorong pelaksanaan perizinan satu pintu

b. Kelemahan (weakness)

1. Kurang tersedianya data-data dan informasi peluang investasi yang up to date
2. Belum optimalnya sistem pelayanan perizinan secara online.
3. Kurang optimalnya penguasaan di bidang penanaman modal.
4. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia

Identifikasi faktor eksternal:

a. Peluang (Opportunities)

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
2. Masih tersedianya kawasan industri.
3. Adanya tawaran promosi investasi di luar daerah.

b. Ancaman (threats)

1. Semakin banyaknya daerah lain sebagai tujuan penanaman modal.
2. Belum tergalinya potensi investasi daerah
3. Belum optimalnya potensi investasi daerah.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah-masalah tersebut maka dapat disimpulkan isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan aplikasi SIAP Maslahat dengan melakukan pengembangan sistem menjadi aplikasi SMART .
2. Meningkatkan kegiatan sosialisasi terkait NIB melalui Layanan OB-Van.
3. Penyusunan Perda Penanaman Modal, RUPM, Perda Kebijakan Insentif.
4. Pembuatan Investor Lounge yang informatif dan Investment Gathering.
5. Penguatan Pelayanan MPP

Tabel 2.2
Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertumbuhan industri memiliki kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Pasuruan	Belum ada Perda Penanaman Modal, RUPM dan Perda Kebijakan Insentif untuk mendorong investasi	Belum adanya Kebijakan Insentif untuk mendorong investasi			Pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025 - 2029 disebutkan bahwa permasalahan regional Jawa yang relevan dengan tugas dan wewenang Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah produksi tenaga listrik masih didominasi oleh sumber energi fosil dengan bauran pembangkit listrik terbarukan relatif rendah	Perlunya kepastian hukum dan arah kebijakan Penanaman Modal
	Belum Optimalnya penawaran peluang investasi & kurangnya promosi investasi yang terpadu dan berbasis data potensial	Belum optimalnya penawaran peluang investasi				Optimalnya partisipasi publik dan dunia usaha
	Tidak adanya fasilitas informatif untuk memperkenalkan					Pembuatan Investment Lounge yang informatif, dan diselenggarakannya Investment Gathering

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dan menarik minat calon investor					
	masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dalam penyampaian LKPM					Mengoptimalkan pengawasan , penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usaha
	Belum Optimalnya sistem pelayanan perizinan secara online dan belum maksimalnya persentase penerbitan perizinan berusaha yang tepat waktu sesuai SOP;					Sosialisasi melalui media sosial (Website, Instagram, Youtube, Wa Layanan) terkait update sistem aplikasi “ SMART “ Versi 2.0 dan MPP Digital beserta tutorial / tata cara operasionalnya.
	Belum optimalnya upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan IKM dan UMKM					

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Hilangnya daya tarik insentif akibat Global Minimum Tax (GMT)	Daya saing lingkungan bisnis di Indonesia belum sepenuhnya kompetitif. Lingkungan bisnis yang kompetitif membutuhkan birokrasi yang efisien, peraturan yang konsisten dan mudah diprediksi, serta akses yang lebih mudah bagi investor asing dan domestik untuk beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.		Masih belum optimalnya peningkatan iklim investasi membutuhkan upaya memperkuat infrastruktur ekonomi, mempermudah regulasi investasi, dan mendorong sektor-sektor unggulan di wilayah tertinggal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
			Kompetisi menarik investasi semakin sengit akibat polikrisis global	Reformasi Birokrasi yang belum sesuai dengan harapan berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa masih ada hambatan dalam menyempurnakan kualitas pelayanan yang responsif dan		

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				adaptif terhadap kebutuhan investor.		
			Dalam jangka panjang, iklim akan menjadi risiko utama bisnis global	Dukungan regulasi terkait penanaman modal belum sepenuhnya optimal karena kompleksitas dan terkadang inkonsistensi regulasi antara berbagai tingkatan pemerintahan menciptakan ketidakpastian bagi investor, juga menambah beban administratif yang berpotensi meningkatkan biaya operasional		
			Pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi meningkat	Keefektifan investasi masih rendah (Skor ICOR tinggi) karena kendala masih tingginya biaya logistik		

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			an emisi karbon			
				Nilai investasi yang belum sepenuhnya fokus pada sektor prioritas, termasuk sektor hilirisasi, riset dan inovasi, dan industri manufaktur berorientasi ekspor		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pasuruan s/d 2029 "Kabupaten Pasuruan yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan". Visi tersebut mengandung tiga pokok visi yang merupakan gambaran atas kondisi Kabupaten Pasuruan yang diharapkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD, yaitu "Maju", "Sejahtera", dan "Berkeadilan". Secara substansi, penjelasan dari ketiga pokok visi antara lain sebagai berikut:

1. Pokok visi "Maju", mengandung makna dan sekaligus spirit bahwa Kabupaten Pasuruan ke depan harus mengalami "Kemajuan di Segala Bidang". Kemajuan tersebut dicerminkan dengan semakin tinggi dan mudahnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, kesempatan kerja yang merata dan layanan publik lainnya yang berkualitas. Berbagai kemajuan tersebut didukung dengan layanan infrastruktur dan pondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pembangunan (Good Governance). Kondisi ini juga didukung dengan terjalannya kemitraan Hexahelix, yaitu konsep kolaborasi yang melibatkan enam pihak, yang terdiri atas pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, lingkungan hidup, dan media massa. Konsep ini akan menjadi stimulus berbagai sektor, seperti inovasi pelayanan publik, pengembangan pariwisata, dan program Corporate Social Responsibility (CSR). Implementasi konsep ini juga mendorong adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi guna mengoptimalkan kolaborasi dalam membangun daerah. Pelayanan publik pun telah berbasis teknologi informasi (Digital) yang didukung oleh aparatur pemerintahan yang lebih adaptif, professional dan humanis dalam menghadapi kondisi/kebutuhan masyarakat dan daerah yang berubah cepat (Volatility), ketidakpastian (Uncertainty), komoleksitas atau kerumitan (Complexcity), dan ketidakjelasan (Ambigue). Pada sisi lain, pokok visi "maju" juga bermakna bahwa pondasi cara berpikir dan berperilaku sumberdaya manusia Kabupaten Pasuruan yang maju, yaitu sumberdaya manusia yang beriman dan

berbudaya serta masyarakat yang saleh yang tercermin dari kondisi masyarakat yang tertib, tentram dan harmonis.

2. Pokok visi “Sejahtera” menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari perekonomian daerah yang kuat dengan tingkat pendapatan perkapita masyarakat terus meningkat, Indeks Pembangunan Manusia meningkat serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Pokok Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (equality). Hal ini tercermin dari peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pembangunan yang merata dan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Perekonomian daerah Kabupaten Pasuruan pun mulai kuat dengan produk asli Pasuruan yang kompetitif dan situasi yang kondusif untuk berusaha maupun berinvestasi. Dukungan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan pendukung pembangunan ekonomi dan sosial pun telah cukup tinggi.
3. Pokok visi “Berkeadilan” bermakna kondisi Kabupaten Pasuruan dengan ketimpangan sosial, ekonomi dan wilayah yang semakin mengecil. Pembangunan yang berpihak kepada kelompok masyarakat atau wilayah marginal terlihat jelas, sehingga kesetaraan gender dan perekonomian yang inklusif juga meningkat signifikan. Keadilan pembangunan antar generasi pun terlihat dengan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan. Pokok visi ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan tanpa terkecuali (No One Left Behind).

Pada tabel 3.1, memuat tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Pasuruan yang berfokus pada peningkatan daya saing investasi daerah.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Kabupaten Pasuruan

Sasaran RPJMD yang relevan :									
1. Meningkatnya Daya saing investasi									
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
meningkatnya nilai investasi daerah		Nilai Realisasi Investasi	12,85 T	12,90 T - 16,50 T	13 ,00 T - 16,51 T	13,13 T - 16,51 T	13,26 T - 16,51 T	13,40 T - 16,54 T	13,53 T - 16,61 T
	meningkatnya jumlah investor	Persentase peningkatan investor	7.83%	0,02 %	0,04 %	0,06 %	0,08 %	0,10 %	0,12 %
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95.81	95.81	95.82	95.83	95.84	95.85	96.00
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	84,55	85	85.05	85.10	85.20	85.30	85.50

Tujuan utama adalah meningkatkan nilai investasi daerah yang ditargetkan terus tumbuh dari baseline tahun 2024 sebesar Rp12,85 triliun menjadi kisaran Rp12,90–16,50 triliun pada tahun 2025, dan meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp13,53–16,61 triliun pada tahun 2030.

Selanjutnya, terdapat sasaran untuk meningkatkan jumlah investor yang diukur melalui persentase peningkatan investor. Dari baseline tahun 2024 sebesar 7,83%, target kenaikan ditetapkan secara bertahap setiap tahun sebesar 0,02% hingga 0,12% pada tahun 2030.

Sasaran berikutnya adalah peningkatan kualitas pelayanan perizinan, yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan baseline 2024 sebesar 95,81, target peningkatan IKM ditetapkan stabil dan meningkat sedikit demi sedikit hingga mencapai 96,00 pada tahun 2030.

Selain itu, untuk mendukung akuntabilitas kinerja, sasaran lain adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD yang diukur melalui nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dari baseline 2024 sebesar 84,55, target ditetapkan meningkat bertahap hingga mencapai 85,50 pada tahun 2030.

Dengan adanya target-target tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk tidak hanya meningkatkan nilai investasi, tetapi juga memperbaiki kualitas pelayanan, menarik lebih banyak investor, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan dalam jangka panjang.

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

3.2.1 Strategi

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Maka dalam menentukan strategi pencapaian dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperhatikan arah kebijakan dan fokus pembangunan pada RPJMD Tahun 2025-2029.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

No	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyusunan Perda Penanaman Modal , Rencana Umum Penanaman Modal, dan Perda Kebijakan Insentif di Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.	Penyusunan Perda Penanaman Modal , Rencana Umum Penanaman Modal, dan Perda Kebijakan Insentif di Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.	Penyusunan Sistem Informasi Peluang Potensi (SIMPELPOT)	Penyusunan Sistem Informasi Peluang Potensi (SIMPELPO T)	Penyusunan Sistem Informasi Peluang Potensi (SIMPELPO T)
2	Konsultasi LKPM secara online ke pelaku usaha di Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Konsultasi LKPM secara online ke pelaku usaha di Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Konsultasi LKPM secara online ke pelaku usaha di Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Konsultasi LKPM secara online ke pelaku usaha di Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Konsultasi LKPM secara online ke pelaku usaha di Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
3	Layanan Gebyar NIB (Layanan OB-Van) di Program Pelayanan Penanaman Modal	Layanan Gebyar NIB (Layanan OB-Van) di Program Pelayanan Penanaman Modal	Layanan Gebyar NIB (Layanan OB-Van) di Program Pelayanan Penanaman Modal	Layanan Gebyar NIB (Layanan OB-Van) di Program Pelayanan Penanaman Modal	Layanan Gebyar NIB (Layanan OB-Van) di Program Pelayanan Penanaman Modal
4	Aplikasi Perizinan SMART	Aplikasi Perizinan SMART	Aplikasi Perizinan SMART	Aplikasi Perizinan SMART	Aplikasi Perizinan SMART
5	Pembuatan Investor Lounge yang informatif	Pembuatan Investor Lounge yang informatif	Investment Expo	Investment Expo	Investment Expo

Pada Tabel 3.2, menjelaskan tahapan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 2026 hingga 2030. Setiap tahapan memuat program dan kegiatan strategis untuk mendukung peningkatan iklim investasi daerah, pelayanan perizinan, serta pengendalian penanaman modal.

Pada Tahap I (Tahun 2026), fokus kegiatan diarahkan pada penyusunan regulasi berupa Perda Penanaman Modal, Rencana Umum Penanaman Modal, dan Perda Kebijakan Insentif sebagai landasan dalam pengembangan iklim investasi. Selain itu, dilaksanakan konsultasi LKPM secara online, layanan Gebyar NIB melalui OB-Van, pengembangan aplikasi perizinan SMART, serta pembuatan Investor Lounge yang informatif.

Tahap II (Tahun 2027) melanjutkan program penyusunan regulasi yang sama, konsultasi LKPM online, layanan Gebyar NIB, dan aplikasi perizinan SMART. Investor Lounge juga tetap dikembangkan agar lebih informatif sebagai pusat informasi investasi.

Memasuki Tahap III (Tahun 2028), agenda utama adalah penyusunan Sistem Informasi Peluang Potensi (SIMPLEPOT) sebagai platform digital untuk memetakan potensi investasi daerah. Konsultasi LKPM online, layanan Gebyar NIB, serta aplikasi SMART tetap berjalan, sementara Investor Lounge diarahkan menjadi kegiatan berskala lebih besar seperti Investment Expo.

Pada Tahap IV (Tahu 2029), penyempurnaan SIMPLEPOT berlanjut untuk mendukung keterbukaan data peluang investasi daerah. Program konsultasi LKPM online, layanan Gebyar NIB, aplikasi SMART, dan Investment Expo tetap dilaksanakan sebagai agenda rutin tahunan.

Selanjutnya, Tahap V (Tahun 2030) menekankan pada konsistensi implementasi SIMPLEPOT, konsultasi LKPM online, layanan Gebyar NIB, aplikasi SMART, serta penyelenggaraan Investment Expo secara berkelanjutan.

Dengan tahapan yang terencana ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menargetkan terciptanya sistem pelayanan investasi yang lebih sederhana, transparan, dan inovatif, sekaligus memperkuat daya saing daerah dalam menarik investor baru maupun mempertahankan investasi yang telah ada.

Tabel 3.2 B
Optimalisasi Sumber Daya

Sasaran PD	Strategis Optimalisasi Sumber Daya
(1)	(2)
Tujuan:	
Nilai Realisasi Investasi	Penyusunan Kajian NA Penanaman Modal dan Kebijakan Fasilitas insentif di bidang Penanaman Modal
Sasaran :	Penyusunan Perda RUPM
Persentase Peningkatan investor	

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Optimalisasi Mal Pelayanan Publik menuju wilayah WBBM
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	

Tabel 3.2 B menggambarkan strategi optimalisasi sumber daya dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Perangkat Daerah (PD) di bidang penanaman modal dan pelayanan publik.

Tujuan utama dari strategi ini adalah meningkatkan nilai realisasi investasi, memperluas jumlah investor, serta menjaga kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Untuk nilai realisasi investasi, strategi yang ditempuh adalah penyusunan Kajian Naskah Akademik Penanaman Modal serta perumusan kebijakan fasilitas insentif di bidang investasi. Hal ini diharapkan mampu memberikan kepastian regulasi dan menarik lebih banyak investor.

Dalam sasaran peningkatan investor, langkah yang dilakukan adalah penyusunan Peraturan Daerah mengenai Rencana Umum Penanaman Modal (Perda RUPM). Regulasi ini berfungsi sebagai pedoman arah kebijakan investasi jangka panjang di daerah.

Sementara itu, dalam upaya meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), strategi yang ditempuh adalah optimalisasi layanan Mal Pelayanan Publik. Pengembangan MPP diarahkan menuju pencapaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang menekankan pada pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel.

Akhirnya, untuk mendukung peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), strategi optimalisasi diarahkan pada penguatan sistem pengelolaan kinerja agar lebih terukur, efektif, dan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan demikian, tabel ini menunjukkan bahwa setiap sasaran pembangunan di bidang investasi dan pelayanan publik dipadukan dengan strategi optimalisasi sumber daya yang relevan, agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara berkelanjutan.

3.2.2 Arah Kebijakan

Dalam menggambarkan arah kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disusun untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan daya saing iklim investasi daerah.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Mengoptimalkan kemudahan berinvestasi melalui peningkatan kepastian hukum atau Perda Penanaman Modal dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan bagi calon investor	Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur, Perda PM, RUPM, Perda Kebijakan insentif dan pengembangan proses perizinan untuk mempercepat proses pelayanan	Pendukung Proris ke-19
Meningkatnya daya saing Iklim investasi daerah	Mengoptimalkan pengawasan , penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usaha	Melaksanakan pengawaasan , Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Pendukung Asta Cita ke -5
	penyebarluasan informasi melalui media sosial (Website, Instagram, Youtube, Wa Layanan) terkait update sistem aplikasi “ SMART “ Versi 2.0 dan MPP Digital beserta tutorial / tata cara operasionalnya.	Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait	Pendukung Proris ke-19 dan 33
	Dilakukan sosialisasi dan pendampingan oleh petugas bagi pelaku usaha dengan disediakan ruangan khusus (OSS Lounge) di Mall Pelayanan Publik dan juga sosialisasi dan pendampingan ke setiap Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.	Melaksanakan Gebyar NIB disetiap Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dengan OB-Van	
	Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi yang lebih efisien dan efektif guna mendorong	Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, (pembuatan peluang investasi Lounge) dan prosedur pelaksanaan	

Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	penyebaran investasi di Kabupaten Pasuruan	penanaman modal kabupaten pasuruan melalui berbagai media	
	Melakukan koordinasi dengan pendamping TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) untuk mendampingi pelaku usaha disabilitas.	Melaksanakan pelayanan pendampingan jemput bola bagi pelaku usaha khusus disabilitas	inovasi

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, strategi yang ditempuh adalah mengoptimalkan kemudahan berinvestasi melalui kepastian hukum, penyederhanaan prosedur perizinan, dan penyediaan sarana pelayanan investasi. Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan penyederhanaan, standarisasi prosedur, serta kebijakan insentif dan pengembangan proses perizinan untuk mempercepat pelayanan, yang juga menjadi bagian dari pendukung prioritas pembangunan daerah (Proris) ke-19.

Dalam rangka meningkatkan daya saing iklim investasi daerah, strategi yang ditempuh mencakup pengawasan, penyelesaian hambatan, dan fasilitasi masalah yang dihadapi pelaku usaha. Implementasinya meliputi pengawasan, penyelesaian permasalahan, dan percepatan realisasi kegiatan usaha, sesuai dengan Asta Cita ke-5.

Selain itu, terdapat upaya penyebarluasan informasi investasi melalui media sosial dan aplikasi layanan digital, termasuk MPP Digital. Hal ini diimbangi dengan koordinasi bersama perangkat daerah terkait, yang mendukung pendukung prioritas pembangunan daerah (Proris) ke-19 dan ke-33.

Pemerintah daerah juga mendorong sosialisasi serta pendampingan melalui OSS Lounge di Mal Pelayanan Publik maupun di tiap kecamatan, sehingga pelaku usaha dapat memperoleh layanan perizinan lebih mudah. Di tingkat implementasi, kebijakan ini ditunjang dengan pelaksanaan Gebyar NIB di seluruh kecamatan Kabupaten Pasuruan melalui layanan OB-Van.

Untuk meningkatkan efektivitas promosi investasi, strategi diarahkan pada pemanfaatan media dalam penyebaran informasi potensi, promosi, hingga prosedur pelaksanaan penanaman modal.

Dengan demikian, diharapkan minat dan persebaran investasi di Kabupaten Pasuruan dapat terus berkembang.

Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada kelompok pelaku usaha penyandang disabilitas dengan menugaskan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai pendamping. Implementasinya diwujudkan dalam bentuk pelayanan pendampingan jemput bola khusus bagi pelaku usaha disabilitas, sebagai bagian dari inovasi pemerintah daerah.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam mengimplementasikan strategi dan arah kebijakan yang direncanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2021 dalam menguraikan program, kegiatan dan sub kegiatan instansi. Hal ini dilakukan untuk tetap fokus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangkan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis.

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal didukung oleh beberapa program: Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Dalam perencanaan Tahun 2025-2029, DPMPSTSP Kabupaten Pasuruan akan fokus pada peningkatan iklim investasi yang kondusif, penambahan investor melalui sub kegiatan pelaksanaan promosi penanaman modal dalam program promosi penanaman modal dan optimalisasi kemudahan berusaha (ease of doing bussinesss) melalui program pelayanan penanaman modal. Tidak kalah penting memaksimalkan program Asta Cita Presiden yaitu "Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri " kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal agar laporan kegiatan penanaman modal meningkat sehingga realisasi investasi daerah pun meningkat . Serta mendukung Program Prioritas Bupati ke-19 yaitu Kemudahan perizinan berusaha dan menjaga hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPSTSP Kabupaten Pasuruan dijabarkan dalam Tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1.1
Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL													
	Nilai realisasi Investasi		13,00 T - 16,51 T		13,1 3 T - 16,5 1 T		13,26 T - 16,51 T		13,40 T - 16,54 T		13,5 3 T - 16, 61 T		
	Persentase peningkatan investor		0.04 %		0.06 %		0.08 %		0.10 %		0.12 %		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kepuasan investor terhadap pengembang an iklim penanaman modal.	80 %	82,5 %	Rp 621,354 ,000.00	83%	Rp 330,00 0,000.0 0	83,5 %	Rp 335,940 ,000.00	84%	Rp 180,761 ,170.00	84%	Rp 183,65 3,348.7 0	
Tercapainya kepuasan investor terhadap pengembangan iklim PM													
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	Persentase Kebijakan Pemberian Fasilitas/	100 %	100%	Rp 23,000, 000.00	100 %	Rp 10,000, 000.00	100%	Rp 10,180, 000.00	100%	Rp 10,633, 010.00	100 %	Rp 10,803, 138.16	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Insentif dibidang Penanaman Modal												
Tersedianya penetapan pemberian fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (dokumen)	1	1	Rp 23,000,0 00.00	1	Rp 10,000, 000.00	1	Rp 10,180,0 00.00	0	Rp 10,633,0 10.00	0	Rp 10,803, 138.16	
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal													
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen yang disusun dalam	1	4	Rp 598,354 ,000.00	2	Rp 320,00 0,000.0 0	3	Rp 325,760 ,000.00	0	Rp 170,128 ,160.00	0	Rp 172,85 0,210.6 0	
Tersedianya kebijakan penanaman													

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
modal berbasis potensi investasi	kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten pasuruan												
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/K ota (dokumen)	1	1	Rp 292,145, 000.00	1	Rp 160,000 ,000.00	1	Rp 162,880, 000.00	-	Rp -	-	Rp -	
Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota													
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/k ota (dokumen)	1	1	Rp 306,209, 000.00	1	Rp 160,000 ,000.00	1	Rp 162,880, 000.00	1	Rp 170,128, 160.00	1	Rp 172,850 ,210.60	
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota													

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase informasi potensi yg dipublikasik an	60 %	72%	Rp 250,000 ,000.00	75%	Rp 115,00 0,000.0 0	77%	Rp 117,070 ,000.00	77%	Rp 122,279 ,615.00	77%	Rp 124,23 6,088.8 0	
Tercapainya penyampaian informasi potensi daerah melalui promosi investasi													
	Persentase informasi potensi yg diterima oleh investor (%)												
Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase kegiatan promosi investasi daerah yang terlaksana	100 %	100%	Rp 250,000 ,000.00	100 %	Rp 115,00 0,000.0 0	100%	Rp 117,070 ,000.00	100%	Rp 122,279 ,615.00	100 %	Rp 124,23 6,088.8 0	
tercapainya kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan													
Pelaksanaan Kegiatan Promosi penanaman modal daerah kabupaten/ kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan	8	2	Rp 247,000, 000.00	3	Rp 112,000 ,000.00	3	Rp 114,016, 000.00	4	Rp 119,089, 712.00	4	Rp 120,995 ,147.40	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	promosi penanaman modal kabupaten/kota (dokumen)												
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal (dokumen)	-	1	Rp 3,000,000.00									
Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota													
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha	65 %	71%	Rp 204,429,000.00	72%	Rp 125,000,000.00	73%	Rp 127,250,000.00	74%	Rp 132,912,625.00	74%	Rp 135,039,227.00	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal													

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM (%)												
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah Pengendalian palaksanaan penanaman modal di Kab. Pasuruan yang terlaksana (kegiatan)	30	12	Rp 204,429,000.00	12	Rp 125,000,000.00	12	Rp 127,250,000.00	12	Rp 132,912,625.00	12	Rp 135,039,227.00	
Terlaksananya Pengendalian palaksanaan penanaman modal di Kab. Pasuruan yang terlaksana													
Penyelesaian permasalahan dan hambatan yg dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yg di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan	15	10	Rp 111,918,000.00	12	Rp 70,000,000.00	14	Rp 71,260,000.00	15	Rp 74,431,070.00	16	Rp 75,621,967.12	
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan													

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	an kegiatan usahanya (kegiatan usaha)												
Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	jumlah pelaku usaha yg mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (pelaku usaha)	420	150	Rp 45,721,000.00	150	Rp 30,000,000.00	151	Rp 30,540,000.00	152	Rp 31,899,030.00	153	Rp 32,409,414.48	
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko													
Pengawasan penanaman modal	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yg telah	27	15	Rp 46,790,000.00	16	Rp 25,000,000.00	17	Rp 25,450,000.00	18	Rp 26,582,525.00	19	Rp 27,007,845.40	
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data,													

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (kegiatan usaha)												
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaata n data dan informasi	100 %	100%	Rp 19,990,000.00	100 %	Rp 17,000,000.00	100%	Rp 17,306,000.00	100%	Rp 18,076,117.00	100 %	Rp 18,365,334.87	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	penanaman modal												
	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)												
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat daerah	Jumlah pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yg terintegrasi (laporan)	4	4	Rp 19,990,000.00	4	Rp 17,000,000.00	4	Rp 17,306,000.00	4	Rp 18,076,117.00	4	Rp 18,365,334.87	
Terlaksananya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yg terintegrasi.													
	Jumlah pengelolaan data dan informasi perizinan dan non												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	perizinan yg terintegrasi. Meningkatkan Efektifitas Pengolahan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (kegiatan)												
<i>Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</i>	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan	4	4	Rp 19,990,000.00	4	Rp 17,000,000.00	4	Rp 17,306,000.00	4	Rp 18,076,117.00	4	Rp 18,365,334.87	
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang													

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dimanfaatka n (dokumen)												
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Pasuruan	95.8 1	95.8 2		95.8 3		95.8 4		95.85		96.0 0		
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	90 %	92%	Rp 262,003 ,280.00	94%	Rp 130,00 0,000.0 0	96%	Rp 132,340 ,000.00	96%	Rp 138,229 ,130.00	96%	Rp 140,44 0,796.1 0	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko													

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(layanan terpadu)												
Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah pemohon yg melaksanakan pemantauan pemenuhan keputusan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan pm bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha dan jumlah pemohon yang melakukan konsultasi dan	8500	10550	Rp 262,003,280.00	10600	Rp 130,000,000.00	10630	Rp 132,340,000.00	10650	Rp 138,229,130.00	10680	Rp 140,440,796.10	
terlayaninnya permohonan pemenuhan komitmen dan konsultasi perizinan dan non perizinan													

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	pengaduan (pelaku usaha)												
	Jumlah Pemohon Pemenuhan Komitmen dan Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan (pemohon)												
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Ins entif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/K ota (dokumen)		1	Rp 17,000,0 00.00	-		-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota													

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah pelaku usaha yg mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (pelaku usaha)	450	510	Rp 114,999,980.00	520	Rp 60,000,000.00	530	Rp 61,080,000.00	540	Rp 63,798,060.00	540	Rp 64,818,828.96	
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													
Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha	5500	200	Rp 49,997,640.00	220	Rp 30,000,000.00	230	Rp 30,540,000.00	240	Rp 31,899,030.00	250	Rp 32,409,414.48	
Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap													

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik (pelaku usaha)												
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten / kota bagi	50	62	Rp 80,005,6 60.00	63	Rp 40,000, 000.00	64	Rp 40,720,0 00.00	65	Rp 42,532,0 40.00	65	Rp 43,212, 552.64	
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha													

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	kegiatan usaha dari pelaku usaha (kegiatan usaha)												
	Nilai Sistem Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPMPTSP	84.5 5	85.0 5		85.1 0		85.2 0		85.30		85.5 0		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ KOTA	Persentase Dokumen/ Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Baik/ Sesuai Regulasi	80 %	80%	Rp 5,465,5 68,520. 00	80%	Rp 5,395,3 52,272. 00	80%	Rp 5,492,4 68,613. 00	80%	Rp 5,737,7 63,037. 00	80%	Rp 5,828,9 34,242. 00	
Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik													
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja DPMPTSP	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/	100 %	100%	Rp 57,533, 500.00	100 %	Rp 58,981, 532.97	100%	Rp 60,043, 200.67	100%	Rp 63,594, 693.82	100 %	Rp 63,979, 205.82	
Tersedianya dok perencanaan,													

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
penganggaran, dan evaluasi yang selaras	subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi												
<i>Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah</i>	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	12	12	Rp 9,585,00 0.00	12	Rp 9,824,6 25.00	12	Rp 10,001,4 68.25	12	Rp 10,446,5 33.59	12	Rp 10,613, 678.12	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
<i>Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi	5	5	Rp 38,967,5 00.00	5	Rp 39,941, 687.50	5	Rp 40,660,6 37.88	5	Rp 42,470,0 36.26	5	Rp 43,149, 556.84	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	kinerja SKPD (laporan)												
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan												
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	4	4	Rp 8,981,00 0.00	4	Rp 9,215,2 20.47	4	Rp 9,381,09 4.55	4	Rp 10,678,1 23.98	4	Rp 10,215, 970.86	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggu ngjawabkan												
Tersedianya laporan keuangan yang akurat		100 %	100%	Rp 3,561,5 02,721. 00	100 %	Rp 3,650,5 40,289. 00	100%	Rp 3,716,2 50,014. 00	100%	Rp 3,881,6 23,140. 00	100 %	Rp 3,943,7 29,110. 00	
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)												
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		25	21	Rp 3,467,54 2,	21	Rp 3,554,2 31,289. 00	21	Rp 3,618,20 7,452.00	21	Rp 3,779,21 7,684.00	21	Rp 3,839,6 85,167. 00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)	24	24	Rp 30,000,000.00	24	Rp 30,750,000.00	24	Rp 31,303,500.00	24	Rp 32,696,505.75	24	Rp 33,219,649.84	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
Pelaksanan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	12	12	Rp 63,960,000.00	12721.00	Rp 65,559,000.00	12	Rp 66,739,062.00	12	Rp 69,708,950.26	12	Rp 70,824,293.46	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD													
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100 %	100%	Rp 172,287,500.00	100 %	Rp 140,000,000.00	100%	Rp 142,520,000.00	100%	Rp 148,862,140.00	100 %	Rp 151,243,934.20	
Terlaksananya administrasi kepegawaian dengan baik													
Pendidikan dan pelatihan pegawai	Jumlah pegawai	5	5		4		4		4		4		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
berdasarkan tugas dan fungsi	berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)			Rp 89,920,000.00		Rp 70,000,000.00		Rp 71,260,000.00		Rp 74,431,070.00		Rp 75,621,967.12	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	56	55	Rp 82,367,500.00	43	Rp 70,000,000.00	43	Rp 71,260,000.00	43	Rp 74,431,070.00	43	Rp 75,621,967.12	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	100 %	100%	Rp 455,729,990.00	100 %	Rp 433,069,750.00	100%	Rp 440,865,005.50	100%	Rp 460,483,498.20	100 %	Rp 467,851,234.20	
Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah													
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan	14	2	Rp 10,149,400.00	2	Rp 10,000,000.00	2	Rp 10,180,000.00	2	Rp 10,633,010.00	2	Rp 10,803,138.16	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)												
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	1	3	Rp 125,112,450.00	3	Rp 110,000,000.00	3	Rp 111,980,000.00	3	Rp 116,963,110.00	3	Rp 118,834,519.80	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor													
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	4	1	Rp 23,900,000.00	1	Rp 20,000,000.00	1	Rp 20,360,000.00	1	Rp 21,266,020.00	1	Rp 21,606,276.32	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan													
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	12	12	Rp 3,102,500.00	12	Rp 3,000,000.00	12	Rp 3,054,000.00	12	Rp 3,189,903.00	12	Rp 3,240,941.45	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	disediakan (laporan)												
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan	12	12	Rp	12	Rp	12	Rp	12	Rp	12	Rp	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	fasilitasi kunjungan tamu (laporan)			98,275,6 40.00		90,000, 000.00		91,620,0 00.00		95,697,0 90.00		97,228, 243.44	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan	12	12	Rp	12	Rp	12	Rp	12	Rp	12	Rp	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	aan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)			195,190, 000.00		200,069 ,750.00		203,671, 005.50		212,734, 365.20		216,138 ,115.10	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100 %	100%	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	
terlaksananya pengadaan BMD yg terealisasi				275,000 .00		-		-		-		-	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Unit Kendaraan	2	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia (unit)												
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	1	0	Rp 275,000. 00	0	Rp -		Rp -				Rp -	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase jasa penunjang opersional kantor yang tersedia	100 %	100%	Rp 743,089 ,009.00	100 %	Rp 742,43 9,762.5 0	100%	Rp 755,803 ,678.20	100%	Rp 789,436 ,941.90	100 %	Rp 802,06 7,933.0 0	
Terpenuhinya penunjang operasional kantor													
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan	2	2		2		2		2		2		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	penyediaan jasa surat menyurat (laporan)			Rp 1,700,00 0.00		Rp 1,742,5 00.00		Rp 1,773,86 5.00		Rp 1,852,80 1.99		Rp 1,882,4 46.82	
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan	12	12	Rp 625,070, 500.00	12	Rp 640,697 ,262.50	12	Rp 652,229, 813.20	12	Rp 681,254, 039.90	12	Rp 692,154 ,104.60	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)												
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan	2	2	Rp 116,318, 509.00	2	Rp 100,000 ,000.00	2	Rp 101,800, 000.00	2	Rp 106,330, 100.00	2	Rp 108,031 ,381.60	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)												
Pemeliharaan barang milik daerah		100 %	100%		100 %	Rp 370,32	100%		100%		100 %	Rp 400,06	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD kondisi baik			Rp 475,150,800.00		0,937.50		Rp 376,986,714.40		Rp 393,762,623.20		2,825.10	
Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik													
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	2	1	Rp 87,337,500.00	1	Rp 89,520,937.50	1	Rp 91,132,314.38	1	Rp 95,187,702.36	1	Rp 96,710,705.60	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	4	12	Rp 59,999,800.00	12	Rp 55,800,000.00	12	Rp 56,804,400.00	12	Rp 59,332,195.80	12	Rp 60,281,510.93	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya (unit)												
Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi (unit)	6	5	Rp 210,000,000.00	5	Rp 150,000,000.00	5	Rp 152,700,000.00	5	Rp 159,495,150.00	5	Rp 162,047,072.40	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D	6	176	Rp 117,813,500.00	50	Rp 75,000,000.00	50	Rp 76,350,000.00	50	Rp 79,747,575.00	50	Rp 81,023,536.20	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung													

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line Tahu n 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Ket era nga n
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kantor atau Bangunan Lainnya	irehabilitasi (unit)												
TOTAL				Rp 6,823,3 44,800. 00		Rp 6,112,3 52,272. 00		Rp 6,222,3 74,613. 00		Rp 6,330,0 21,694. 00		Rp 6,430,6 69,038. 00	

Tabel 4.1.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Astacita Presiden :
			Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
			Penyelesaian permasalahan dan hambatan yg dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	
			Pengawasan penanaman modal	
				33 Program Prioritas Bupati :
		Tersedianya Perda Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Kemudahan 9. perizinan berusaha dan menjaga hub industrial harmonis dan saling menguntungkan
		Tersedianya Perda RUPM	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	
		Tersedianya Peta Potensi Investasi	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	
		Terlaksananya pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tercapainya penyampaian informasi potensi daerah melalui promosi investasi	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	
		Terlaksananya pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	3 Digitalisasi layanan public, 3 pengembangan pasuruan satu data dan SPBE
		Tersedianya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat daerah	

Pada tabel 4.1.2 terdapat referensi terhadap "Asticita Presiden," yang menyatakan tujuan untuk melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam. Sementara itu, kolom "33 Program Prioritas Bupati" menunjukkan prioritas yang lebih terfokus pada kemudahan perizinan usaha dan pengelolaan industri.

Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan strategi pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan investasi, pemberian fasilitas yang mendukung pelaku usaha, serta penyusunan kebijakan yang relevan dengan kondisi daerah.

Tabel 4.1.3
Rencana Kegiatan Konkrit pertahun Terkait 33 PP Bupati

PP Bupati	Rencana Kegiatan					Sub Kegiatan
	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kemudahan Perizinan berusaha dan menjaga hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan	Koordinasi dengan pelaku usaha seperti sosialisasi perizinan berusaha (500000000)	Koordinasi dengan pelaku usaha seperti sosialisasi perizinan berusaha (512500000)	Koordinasi dengan pelaku usaha seperti sosialisasi perizinan berusaha (525312500)	Koordinasi dengan pelaku usaha seperti sosialisasi perizinan berusaha (538445310)	Koordinasi dengan pelaku usaha seperti sosialisasi perizinan berusaha (551906450)	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Menyusun dokumen RUPM (300000000)	Menyusun dokumen RUPM (307500000)	Menyusun dokumen RUPM (315187500)	-	-	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota
	Menyusun peta potensi (550000000)	Menyusun peta potensi (563750000)	Menyusun peta potensi (577843750)	Menyusun peta potensi (592289840)	Menyusun peta potensi (607097090)	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota
	koordinasi dengan pelaku usaha untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan yg di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan	koordinasi dengan pelaku usaha untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan yg di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan	koordinasi dengan pelaku usaha untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan yg di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan	koordinasi dengan pelaku usaha untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan yg di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan	koordinasi dengan pelaku usaha untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan yg di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yg dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya

PP Bupati	Rencana Kegiatan					Sub Kegiatan
	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	kegiatan usahanya (343901500)	kegiatan usahanya (352499037,5)	kegiatan usahanya (361311513,44)	kegiatan usahanya (370344301,27)	kegiatan usahanya (379602908,81)	
	koordinasi dengan pelaku usaha dengan kegiatan usaha dari pelaku usaha yg telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (kegiatan usaha) (345000000)	koordinasi dengan pelaku usaha dengan kegiatan usaha dari pelaku usaha yg telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (kegiatan usaha) (353625000)	koordinasi dengan pelaku usaha dengan kegiatan usaha dari pelaku usaha yg telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (kegiatan usaha) (362465625)	koordinasi dengan pelaku usaha dengan kegiatan usaha dari pelaku usaha yg telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (kegiatan usaha) (371527265,63)	koordinasi dengan pelaku usaha dengan kegiatan usaha dari pelaku usaha yg telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (kegiatan usaha) (380815447,27)	Pengawasan penanaman modal
	memfasilitasi pelaku usaha yg mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha	memfasilitasi pelaku usaha yg mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha	memfasilitasi pelaku usaha yg mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha	memfasilitasi pelaku usaha yg mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha	memfasilitasi pelaku usaha yg mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik

PP Bupati	Rencana Kegiatan					Sub Kegiatan
	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	terintegrasi secara elektronik (pelaku usaha) (550000000)	terintegrasi secara elektronik (pelaku usaha) (563750000)	terintegrasi secara elektronik (pelaku usaha) (577843750)	terintegrasi secara elektronik (pelaku usaha) (529289843,75)	terintegrasi secara elektronik (pelaku usaha) (607097089)	
	melakukan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen) (300000000)					Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
	melakukan kegiatan pameran (2720000000)	melakukan kegiatan pameran (2788000000)	melakukan kegiatan pameran (2857700000)	melakukan kegiatan pameran (2929142500)	melakukan kegiatan pameran (3002371062,5)	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
	Melakukan Kegiatan Temu Pengusaha (Investment Gathering)	Melakukan Kegiatan Temu Pengusaha (Investment Gathering)	Melakukan Kegiatan Temu Pengusaha (Investment Gathering)	Melakukan Kegiatan Temu Pengusaha (Investment Gathering)	Melakukan Kegiatan Temu Pengusaha (Investment Gathering)	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
Digitalisasi Layanan	melakukan kegiatan dengan	melakukan kegiatan dengan	melakukan kegiatan dengan	melakukan kegiatan dengan	melakukan kegiatan dengan	Penyediaan Pelayanan Perizinan

PP Bupati	Rencana Kegiatan					Sub Kegiatan
	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengembangan Pasuruan satu data dan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (pelaku usaha) (350000000)	pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (pelaku usaha) (358750000)	pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (pelaku usaha) (367718750)	pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (pelaku usaha) (376911718)	pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (pelaku usaha) (386334511)	Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik
	menyajikan data Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (dokumen) (121000000)	menyajikan data Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (dokumen) (124025000)	menyajikan data Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (dokumen) (127125625)	menyajikan data Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (dokumen) (130303765)	menyajikan data Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (dokumen) (133561359)	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat daerah

Bahwa rencana kegiatan yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan berfokus pada dua prioritas utama: kemudahan perizinan berusaha dan digitalisasi layanan pengembangan investasi. Dalam jangka waktu 2025 hingga 2030, kegiatan ini direncanakan untuk berkembang secara bertahap dengan tujuan akhir untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya tarik investasi di daerah. Adapun langkah-langkah yang direncanakan meliputi:

- Koordinasi dengan pelaku usaha untuk memastikan sistem perizinan berbasis elektronik berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh semua pihak.
- Penyusunan dokumen, kebijakan terkait untuk mendukung kelancaran proses perizinan dan investasi, serta memastikan keselarasan dengan regulasi daerah.
- Peningkatan sistem perizinan elektronik, yang bertujuan untuk mempercepat proses perizinan dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.
- Evaluasi dan pengembangan berkelanjutan dari sistem perizinan dan layanan investasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing daerah.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung iklim investasi yang lebih baik melalui perizinan yang lebih cepat, transparan, dan berbasis digital.

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan dijadikan acuan keberhasilan terhadap pelaksanaan serta pencapaian target tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja dengan indikasi yang lebih baik serta dapat menggambarkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban namun juga sebagai komponen yang sangat penting untuk menetapkan rencana kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan

indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan telah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan sebagai penentuan apakah rencana yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak.

Penetapan indikator kinerja saat merencanakan kinerja dapat meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya:

1. Spesifik dan jelas, untuk menghindari kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Menangani aspek-aspek yang relevan.
4. Harus penting atau berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, output, hasil/ outcome, manfaat maupun dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan pelaksanaan.
6. Efektif, dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia.

I. Indikator Kinerja Utama

Nilai Investasi yang terealisasi menjadi indikator tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Pasuruan, hal ini berbeda dengan rencana strategis periode sebelumnya dimana 'nilai investasi' menjadi indikator kinerja sasaran. Berdasarkan perencanaan pembangunan daerah berbasis tematik Kabupaten Pasuruan dimana perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang berkaitan satu dengan yang lainnya (Permendagri No. 86 Tahun 2017, Pasal 10)

Pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas daerah, identifikasi program-program sampai koordinasi antar perangkat daerah yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas daerah di tingkat Kabupaten Pasuruan.

Tabel 4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah										
N O	Indikato r	Sat uan	Baselin e Tahun 2024	Target Tahun						Kete rang an
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	IKU (tujuan & sasaran)									
	Nilai Realisasi investasi	Trili yun (Rp)	12,85 T	12,90 T - 16,50 T	13,00 T - 16,51 T	13,13 T - 16,51 T	13,26 T - 16,51 T	13,40 T - 16,54 T	13,53 T - 16,61 T	
	Sasaran :									
	Persentas e Peningka tan investor	Per sent ase (%)	7,83 %	0,02 %	0,04 %	0,06 %	0,08 %	0,10 %	0,12 %	
	Indeks Kepuasa n Masyarak at (IKM)	Nila i	95.81	95.81	95.82	95.83	95.84	95.85	96.00	
	Nilai SAKIP DPMPTS P	Nila i	84.55	85	85.05	85.10	85.20	85.30	85.50	

Dari tabel tersebut terlihat bahwa DPMPTSP Kabupaten Pasuruan menargetkan peningkatan investasi, bertambahnya jumlah investor, meningkatnya kepuasan masyarakat, serta membaiknya nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) secara konsisten dari tahun 2024 hingga 2030. Target ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim investasi, memperbaiki kualitas layanan, dan menjaga tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

II. Indikator Kinerja Kunci

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ditetapkan target kinerja urusan Penanaman Modal yang diampu oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Penanaman Modal tertuang pada tabel 4.2.2 dibawah ini;

Indikator Kinerja Kunci

N O	Indikator	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target Tahun						Kete rang an
				202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota /Kota	Persentase (%)	5.3	5.31	5.32	5.33	5.34	5.35	5.36	

Pada Tabel diatas, menunjukkan indikator kinerja kunci terkait persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota. Satuan yang digunakan adalah persentase (%), dengan baseline tahun 2024 sebesar 5,3%.

Target tahunan ditetapkan secara bertahap dan konsisten mengalami peningkatan kecil namun stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025 target ditetapkan sebesar 5,31%, kemudian meningkat menjadi 5,32% di tahun 2026, 5,33% di tahun 2027, serta 5,34% di tahun 2028. Selanjutnya, target naik lagi menjadi 5,35% di tahun 2029, hingga mencapai 5,36% pada tahun 2030.

Dengan pola pertumbuhan yang berkesinambungan tersebut, tabel ini mencerminkan adanya upaya Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan daya tarik investasi secara gradual, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Sedangkan untuk Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan perdagangan berupa Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) pada dasarnya merupakan kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dalam hal ini, DPMPTSP berperan menyediakan dan mencukupi data pelaku usaha yang telah memperoleh izin. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dimanfaatkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengukur capaian indikator kinerja kunci sesuai dengan tupoksi yang melekat pada urusan perdagangan.

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan. Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029. Sebagai upaya merealisasikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029. Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 dikendalikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan;
2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan/Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Prioritas, dan unggulan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2030;
3. Renstra-PD sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja-PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta Stakeholder terkait berkomitmen untuk mencapai Tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun yang tertuang dalam Rencana Strategis dimaksud untuk menjaga agar Realisasi Investasi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dukungan positif dari para pemangku kepentingan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan dalam menyusun perencanaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi yang membantu kelancaran penyelenggaraan bidang urusan penanaman modal di Kabupaten Pasuruan

Pasuruan, 19 September 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pasuruan



RIDWAN HARRIS, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19820825 200012 1 002